



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022
AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Andi Widjanto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	56
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
F. Pengungkapan Penting Lainnya	65
VI. Penutup	69
VII. Lampiran	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022 (AUDITED)

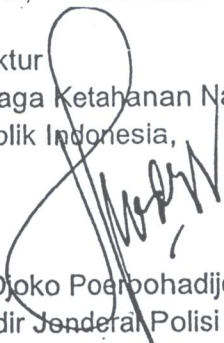
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 (*Audited*) berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2023

Inspektur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,


Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si.
Brigadir Jenderal Polisi



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JLN. MEDAN MERDEKA SELATAN NO 10, JAKARTA 10110
TELEPON 021 3832227

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Andi Widjajanto

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara untuk per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp668.102.546,00 atau mencapai 55,05% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.213.654.000,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.916.570.241,00 atau mencapai 98,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp179.155.609.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.658.762.617.534,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.382.349.756,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.654.411.704.736,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.968.563.042,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.179.334.791,00 dan Rp1.657.583.282.743,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp963.799.035,00, sedangkan jumlah beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.891.907.364,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp201.928.108.329,00). Kegiatan Non Operasional terdiri Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp20.270.010,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Kegiatan

Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.090.328.584,00 serta Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 sehingga Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.110.598.594,00. Dengan demikian entitas mengalami Defisit-LO per 31 Desember 2022 sebesar (Rp200.817.509.735,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp1.682.723.594.943,00, ditambah Defisit-LO sebesar (Rp200.817.509.735,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar (Rp974.167.160,00) serta transaksi antar entitas senilai Rp176.651.364.695,00 sehingga penurunan Ekuitas sebesar (Rp25.140.312.200,00). Ekuitas entitas per 31 Desember 2022 senilai Rp1.657.583.282.743,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021 (disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	per 31 Desember 2022		% thd Angg	per 31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.5.1.a, B.1	1.213.654.000,00	668.102.546,00	55,05	2.311.682.543,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.213.654.000,00	668.102.546,00	55,05	2.311.682.543,00
BELANJA	A.5.2, B.2		0,00		
Belanja Pegawai	A.5.2, B.3	79.957.424.000,00	79.679.020.836,00	99,65	71.066.611.262,00
Belanja Barang	A.5.2, B.4	98.033.687.000,00	96.117.141.064,00	98,05	76.606.108.866,00
Belanja Modal	A.5.2, B.5	1.164.498.000,00	1.120.408.341,00	96,21	6.602.687.659,00
JUMLAH BELANJA		179.155.609.000,00	176.916.570.241,00	98,75	154.275.407.787,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2023

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Andi Widjianto

II. NERACA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (disajikan dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	A.5.4.a).(1), C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	C.3	200.766.093,00	339.608.713,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	A.5.4.a).(3), C.4	47.633.750,00	112.504.750,00
Persediaan	A.5.4.a).(6), C.5	1.133.949.913,00	1.484.969.116,00
Jumlah Aset Lancar		1.382.349.756,00	1.937.082.579,00
ASET TETAP			
Tanah	A.5.4.b).(1), C.6	1.378.951.719.000,00	1.378.951.719.000,00
Peralatan dan Mesin	A.5.4.b).(2), C.7	374.186.141.790,00	375.146.808.680,00
Gedung dan Bangunan	A.5.4.b).(3), C.8	302.929.654.691,00	302.230.984.481,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	A.5.4.b).(4), C.9	10.888.276.247,00	10.888.276.247,00
Aset Tetap Lainnya	A.5.4.b).(5), C.10	12.274.665.023,00	11.917.337.823,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	A.5.4.c), C.11	(424.818.752.015,00)	(401.903.758.834,00)
Jumlah Aset Tetap		1.654.411.704.736,00	1.677.231.367.397,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	A.5.4.d).(1), C.12	140.235.396.360,00	213.898.975.503,00
Aset Lain-Lain	A.5.4.d).(3), C.13	79.789.979.826,00	5.551.917.762,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	A.5.4.e), C.14	(217.056.813.144,00)	(214.645.627.744,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.968.563.042,00	4.805.265.521,00
JUMLAH ASET		1.658.762.617.534,00	1.683.973.715.497,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	544.622.320,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	A.5.5.a).(2), C.16	634.712.471,00	1.250.120.554,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.179.334.791,00	1.250.120.554,00
EKUITAS			
Ekuitas	A.5.6, C.17	1.657.583.282.743,00	1.682.723.594.943,00
JUMLAH EKUITAS		1.657.583.282.743,00	1.682.723.594.943,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.658.762.617.534,00	1.683.973.715.497,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2023



III. LAPORAN OPERASIONAL

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (disajikan dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.5.1.b, D.1	963.799.035,00	910.428.268,00
JUMLAH PENDAPATAN		963.799.035,00	910.428.268,00
BEBAN			
Beban Pegawai	A.5.3.a), D.2	79.679.020.836,00	71.066.611.262,00
Beban Persediaan	A.5.3.b), D.3	1.362.595.079,00	714.181.793,00
Beban Barang dan Jasa	A.5.3.c), D.4	66.446.895.109,00	54.528.870.146,00
Beban Pemeliharaan	A.5.3.d), D.5	11.482.249.891,00	14.669.629.381,00
Beban Perjalanan Dinas	A.5.3.e), D.6	17.377.230.138,00	6.297.127.436,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	A.5.3.f), D.7	0,00	54.595.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	A.5.3.g), D.8	26.543.916.311,00	35.707.615.022,00
JUMLAH BEBAN		202.891.907.364,00	183.038.630.040,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(201.928.108.329,00)	(182.128.201.772,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	20.270.010,00	351.955.997,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0,00	5.604.343,00
SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		20.270.010,00	346.351.654,00
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.090.328.584,00	806.685.041,00
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.090.328.584,00	806.685.041,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.10	1.110.598.594,00	1.153.036.695,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(200.817.509.735,00)	(180.975.165.077,00)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(200.817.509.735,00)	(180.975.165.077,00)

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2023

Gubernur
 Lembaga Ketahanan Nasional
 Republik Indonesia,

 Andi Widjajanto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (disajikan dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	A.5.6, E.1	1.682.723.594.943,00	1.744.780.158.550,00
SURPLUS/DEFISIT LO	A.5.6, E.2	(200.817.509.735,00)	(180.975.165.077,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	A.5.6, E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	A.5.6, E.4	(974.167.160,00)	(34.158.016.671,00)
Penyesuaian Nilai Aset	A.5.6, E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	A.5.6, E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	A.5.6, E.4.3	(3.525.000,00)	(37.768.406.686,00)
Selisih Revaluasi Aset	A.5.6, E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	A.5.6, E.4.5	(970.642.160,00)	3.385.157.835,00
Koreksi Lain-lain	A.5.6, E.4.6	-	225.232.180
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	A.5.6, E.5	176.651.364.695,00	153.076.618.141,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(25.140.312.200,00)	(62.056.563.607,00)
EKUITAS AKHIR	A.5.6, E.6	1.657.583.282.743,00	1.682.723.594.943,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jakarta, Mei 2023

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Andi Widjajanto

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
per 31 Desember 2022
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(disajikan dalam bentuk rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia**

Perkembangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) disertai dengan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang terdiri dari global, regional dan nasional, tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi langkah-langkah para tokoh pendahulu pelaku sejarah sejak lahirnya Lemhannas RI pada tanggal 20 Mei 1965. Perkembangan lingkungan tersebut merupakan fenomena kehidupan sehingga tidak mungkin dihindari tetapi harus dikelola secara tepat sehingga bangsa Indonesia tidak terombang ambing oleh arus perubahan tetapi dapat mengambil manfaat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagai mana telah diamanatkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya Lemhannas RI telah mengalami beberapa perubahan antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1967 tanggal 14 Agustus 1967 tentang pengendalian Lemhannas dialihkan dari Presiden RI kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan. Sesuai dengan keputusan tersebut, Lemhannas bertanggung jawab kepada Menhankam/ Pangab dan Pengendalian sehari hari diserahkan kepada Wakil Panglima ABRI.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 07 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974, Lemhannas RI ditetapkan sebagai salah satu badan pelaksana Dephankam dengan tugas membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara ketahanan nasional. Sejalan dengan re-organisasi ABRI dan dipisahkannya jabatan Menhankam dan Pangab maka Lemhannas bertanggung jawab kepada Panglima ABRI dengan tugas pokok menyelenggarakan pengkajian strategis dan pendidikan, pementapan dan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif.
3. Pada tanggal 2 Februari 1994, Lemhannas diserahkan terimakan dari Panglima ABRI kepada Menhankam. Selanjutnya istilah Lembaga Pertahanan Nasional

berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Kepres RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional.

4. Pada Periode tahun 1994-1996, jabatan Menhankam dan Panglima ABRI kembali digabung, sehingga kedudukan Lemhannas berada dibawah Menhankam/Pangab tanpa mengalami perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Catatan utama yang dapat dikemukakan di sini adalah bahwa secara sadar dihayati terjadinya pergeseran dari keamanan simetrik yang militeristik ke arah konsep keamanan komprehensif (*comprehensive security*) yang merupakan *"re-organized security concept"* yang *"goes beyond (but does not exclude) the military to embrace the political, economic and sociocultural dimensions"*.
5. Sesuai tuntutan reformasi, maka Presiden RI mengeluarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sesuai dengan Kepres tersebut maka Lemhannas menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2016, Lemhannas RI melakukan revitalisasi melalui pengembangan organisasi, tugas dan fungsi Gubernur Lemhannas merupakan jabatan non-eselon dan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat Menteri sebagai berikut:

a) Kedudukan

Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam Penyelenggaraan pemerintah di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

b) Tugas

Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional yang berfikir secara kultural dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;

- 2) Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- 2) Pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
- 3) Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- 4) Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- 5) Pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
- 7) Pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategis serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;

- 9) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

d) Struktur Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 pasal 4, struktur organisasi Lemhannas RI dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang diberlakukan mulai TA. 2021 terdiri dari:

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Sekretariat Utama;
- 3) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- 4) Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
- 5) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan;
- 6) Inspektorat; dan
- 7) Pusat Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur dengan jabatan setingkat menteri berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2021 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tersebut menjadi Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Lemhannas RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab sekaligus sebagai *think tank* Presiden RI dalam hal pembinaan ketahanan nasional, telah menetapkan visi sebagai berikut:

” Menjadi Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) yang Berkualitas dan Kredibel dalam bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Misi:

Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
2. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter kebangsaan.
3. Mewujudkan kajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang integratif.

Tabel 5.1 Rencana Strategis Lemhannas RI

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET
01	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	8,30
02	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	8,30
03	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui kajian strategik	8,30
04	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional	8,30
05	Terwujudnya dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik	8,00

Sumber: Diolah dari Renstra Lemhannas RI tahun 2022

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) pada Aplikasi Satuan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

1. a. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/ atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. PNBP dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum Negara. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

*Pendapatan-
LO*

b. Pendapatan- LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan PNBP-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan PNBP yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Belanja Modal
- d) Belanja Bunga Utang
- e) Belanja Subsidi
- f) Belanja Hibah
- g) Belanja Bantuan Sosial
- h) Belanja Lain-lain.

Beban

3. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

- a) Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b) Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

- c) Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d) Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e) Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/ PPK.
- f) Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
- g) Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- h) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang

Aset

4. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a) Aset Lancar

- (1) Kas dan Setara Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- (2) Belanja dibayar dimuka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah.
- (3) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang

berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima tidak sama dengan piutang PNBPN, dimana pengertian piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya.

- (4) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 5.2 Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- (5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- (6) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai PMK No 234/PMK/.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

b) Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Aset tetap terdiri dari:

- (1) Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (2) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau Jaringan dimaksud.
- (5) Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

(6) Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ a tau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/ sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

Pada tahun 2020, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- (1) Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- (a) Tanah
 - (b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - (c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- (3) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- (4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- (5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 s.d. 5 tahun

Sumber: KMK No 59/KMK.06/2013

Aset Lainnya

d) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- (1) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan mencakup Aset Tak Berwujud yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Sumber: KMK No 620/KM.6/2015

*Amortisasi
Aset Tak
Berwujud*

e) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Berdasarkan pasal 49 PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada SAP. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa aset yang digunakan oleh pemerintah termasuk aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud bahwa agar entitas Pemerintah Pusat dapat melakukan amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif, dan optimal diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK no 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam dalam penetapan periode akuntansi. Masa manfaat tersebut dibatasi oleh

ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menetapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tidak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat yang tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset untuk dijual. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Kewajiban

5. Kewajiban

Kewajiban adalah merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban jangka pendek meliputi:

- (1) Utang Kepada Pihak Ketiga, merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/ jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
- (2) Utang yang Belum Diterima Tagihannya merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang

dan/atau jasa dan digunakan untuk mencatat transaksi perolehan barang dan/atau jasa yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi. Utang yang belum diterima tagihannya diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa namun tagihan atas penyerahan barang/jasa tersebut belum diterima oleh pemerintah.

- (3) Pendapatan Diterima di Muka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

6. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/ defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

7. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan di atur pula sesuai dengan PMK No 177 tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dimana di dalamnya memuat transaksi-transaksi akrual yang tertuang pada Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca, Neraca Percobaan, dan Buku Besar. Sementara pada LRA memuat transaksi tahun berjalan sesuai *cash basis*.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi

Pendapatan

Rp668.102.546,00

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp668.102.546,00 dan Rp2.311.682.543,00 atau mencapai 55,05% dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.213.654.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Naik/ Turun (%)
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	100.000.000	20.270.010,00	20,27	351.956.997,00	(94,24)
Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.113.654.000,00	406.643.500,00	36,51	1.259.988.125,00	(67,73)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	6.618.452,00	?	1.304.304,00	407,43
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	7.144.584,00	?	555.000,00	1187,31
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	181.926.000,00	?	599.498.949,00	(69,65)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	45.500.000,00	?	98.132.992,00	(53,63)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-	-	247.100,00	?
Pendapatan anggaran lain-lain	-	-	-	76,00	?
Jumlah	1.213.654.000,00	668.102.546,00	55,05	2.311.682.543,00	(71,10)

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp668.102.546,00 terdiri dari:

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp20.270.010,00 terdiri dari:
 - a. Lelang Scrap dengan Risalah Lelang nomor 506/28/2022 sebesar Rp7.000.010,00 dengan nomor NTPN 1A5336U8ECETOJJH tanggal 18 November 2022
 - b. Lelang Alsatri Alsintor dengan Risalah Lelang nomor 545/28/2022 sebesar Rp13.270.000,00 dengan nomor NTPN 356336UECHDB08J tanggal 2 Desember 2022.
2. Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp406.643.500,00 terdiri dari:
 - a. Pembayaran Sewa Koperasi bulan Januari s.d. Juni 2022 sebesar Rp112.504.750,00 dengan nomor NTPN 8680561QUH4IN50Q tanggal 15 Maret 2022.
 - b. Pembayaran sewa ruang kelas pancasila giat taplai bagi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bulan Agustus 2022 sebesar Rp32.405.000,00 dengan nomor NTPN FEED78N3E1ASF7GT tanggal 24 Agustus 2022.
 - c. Pembayaran Sewa Ruang Kelas Pancasila giat Taplai bagi Jaringan Pengusaha Nasional Tahun 2022 sebesar Rp32.405.000,00 dengan nomor NTPN 048F661QUHMKSDIK tanggal 21 September 2022.
 - d. Pembayaran Sewa Gedung Kegiatan Taplai bagi Ikatan Alumni ITM tanggal 24 s.d. 30 Oktober 2022 sebesar Rp31.636.000,00 dengan nomor NTPN F0EEB6U8ECESKFBH tanggal 17 November 2022.

- e. Pembayaran Sewa Koperasi bulan Juli s.d. Desember 2022 sebesar Rp197.692.750,00 dengan nomor NTPN 5895C2G4V7LR2A4O tanggal 15 Desember 2022.
3. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp6.618.452,00 terdiri dari:
- a. Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Kaporlap Peserta Kegiatan ToT Taplai di Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar Rp154.000,00 dengan nomor NTPN C2AFF7QLU697BCO4 tanggal 11 Maret 2022.
 - b. Pembayaran denda keterlambatan atas pemeliharaan AC di lingkungan Lemhannas RI Tahun 2022 oleh CV Semanggi Jaya sebesar Rp30.400,00 dengan nomor NTPN 750101JNFCEGSLUV tanggal 12 Mei 2022.
 - c. Pembayaran denda keterlambatan belanja barang dukungan dan pelayanan kesiapan konsumsi peserta PPRA LXIV Lemhannas RI tahun 2022 sebesar Rp4.400,00 dengan nomor NTPN 57C5D1JNFCTKHVA5 tanggal 19 Oktober 2022.
 - d. Pembayaran denda keterlambatan belanja barang fullday kegiatan dialog wawasan kebangsaan di Provinsi Bengkulu tahun 2022 sebesar Rp82.500,00 dengan nomor NTPN 16D841JNFD0EV4NP tanggal 14 November 2022.
 - e. Pembayaran denda keterlambatan perbaikan ruang gubernur Lemhannas RI sebesar Rp12.250,00 dengan nomor NTPN A665C7QLU71914QC tanggal 17 November 2022.
 - f. Pembayaran denda keterlambatan pengerjaan pengecatan tembok gedung panca gatra dan pagar halaman kebon sirih Lemhannas RI sebesar Rp23.591,00 dengan nomor NTPN 4D0B86U8ECESK4QV tanggal 17 November 2022.
 - g. Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan survey data siskurtannas Lemhannas RI sebesar Rp192.000,00 dengan nomor NTPN B742A7QLU71FEOK4 tanggal 24 November 2022.
 - h. Pembayaran kekurangan denda keterlambatan pekerjaan Survey data Siskurtanas TA. 2022 sebesar Rp1.397.520,00 dengan nomor NTPN 5C5F961QUHSMM6MO tanggal 24 November 2022.
 - i. Pembayaran denda keterlambatan perbaikan ruang Karoren Lemhannas RI Tahun 2022 sebesar Rp2.250,00 dengan nomor NTPN 648BC61QUHSQQKIK tanggal 28 November 2022.
 - j. Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pemeliharaan AC di Gedung perkantoran Lemhannas RI TA. 2022 sebesar Rp10.988,00 dengan nomor NTPN 2218048VUSO3973M tanggal 1 Desember 2022.
 - k. Pembayaran kekurangan denda penyelesaian keterlambatan pekerjaan dan

- laporan harian Pemeliharaan AC sebesar Rp1.924.106,00 dengan nomor NTPN 97B7E48VUSQ83V1E tanggal 2 Desember 2022.
- l. Pembayaran denda keterlambatan belanja barang biaya renovasi pos jaga gedung Lemhannas RI TA. 2022 sebesar Rp59.130,00 dengan nomor NTPN A88FE8N3E1M97V41 tanggal 5 Desember 2022
 - m. Pembayaran denda keterlambatan denda pekerjaan Survey Data Siskurtannas II Lemhannas RI sebesar Rp48.000,00 dengan nomor NTPN A57541JNFD389LF9 tanggal 8 Desember 2022.
 - n. Pembayaran denda keterlambatan atas pemeliharaan AC di gedung perkantoran Lemhannas RI sebesar Rp133.021,00 dengan nomor NTPN E0F0461QUHV6C4TI 8 Desember 2022.
 - o. Pembayaran denda keterlambatan atas belanja barang biaya pemeliharaan AC di gedung perkantoran Lemhannas RI tahun 2022 berdasarkan SPK/271/XI/2022 tanggal 15 November 2022 sebesar Rp931.145,00 dengan nomor NTPN B395461QUHV7DC1I tanggal 9 Desember 2022
 - p. Pembayaran denda keterlambatan belanja barang operasional penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp261.151,00 dengan nomor NTPN 08B8B2G4V7LVA70Q tanggal 19 Desember 2022.
 - q. Pembayaran denda keterlambatan belanja barang Iklan Laporan Keuangan di Majalah Tempo 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.352.000,00 dengan nomor SP2D 221751301053378 (potongan langsung SPM)
4. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp7.144.584,00 terdiri dari:
 - a. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai THR kepada Tenaga Profesional Lemhannas RI an Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani Tahun 2019 (Tindak Lanjut Temuan BPK RI) sebesar Rp7.143.750,00 dengan nomor NTPN 9D9351JNFCKRN259 tanggal 25 Juli 2022.
 - b. Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp834,00.
 5. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp181.926.000,00 terdiri dari:
 - a. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biro Kerma dan Hukum ke Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp4.164.000,00 dengan nomor NTPN F5B4361QUGU9SR12 tanggal 4 Januari 2022.
 - b. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biro Umum tahun 2021 sebesar Rp18.337.000,00 dengan nomor NTPN 1CF6B3CIF17JDJIV tanggal 25 Januari 2022.

- c. Pengembalian Belanja Barang TAYL atas kelebihan pembayaran honorarium Rapat Pelaksanaan kegiatan review, update dan validasi instrument siskurtannas Rp1.800.000,00 dengan nomor NTPN 2090561QUH1EELBC tanggal 10 Februari 2022.
- d. Pengembalian Belanja Barang TAYL atas sisa uang tiket Kegiatan Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar Rp2.755.000,00. dengan nomor NTPN D3EFC8N3E0OJLMJF tanggal 10 Februari 2022.
- e. Pembayaran kelebihan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp192.000,00 dengan nomor NTPN 35DB90N9VHJ45EN0 tanggal 11 Februari 2022.
- f. Pembayaran kelebihan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp60.000,00 dengan nomor NTPN B66AB2G4V6NSVF2U tanggal 11 Februari 2022.
- g. Pengembalian sisa Pembayaran Transport Lokal dalam Kab/Kota (Peserta, Narsum, Moderator, Panitia daerah) Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp750.000,00 dengan nomor NTPN D0DEA2G4V6NSVFJ6 tanggal 11 Februari 2022.
- h. Pengembalian Sisa Pembayaran Uang Harian Peserta Fullday Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp500.000,00 dengan nomor NTPN 4C8B37QLU667DFU0 tanggal 11 Februari 2022.
- i. Pengembalian Sisa Pembayaran Uang Harian Peserta Fullday Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp255.000,00 dengan nomor NTPN 67CA28N3E0OJQG7D tanggal 11 Februari 2022.
- j. Pengembalian sisa pembayaran transport lokal Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp450.000,00 dengan nomor NTPN 37FFA1JNFC5GIG9L tanggal 11 Februari 2022.
- k. Pengembalian Sisa Pembayaran Uang Harian Peserta Fullday Diseminasi/Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp570.000,00 dengan nomor NTPN 5F6408N3E0OJQGDB tanggal 11 Februari 2022.

- l. Pengembalian sisa Pembayaran Transport Lokal dalam Kab/Kota (Peserta, Narsum, Moderator, Panitia daerah) Diseminasi/ Rediseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp900.000 dengan nomor NTPN 6AB3848VURSLPGFM tanggal 11 Februari 2022.
 - m. Pengembalian sisa Biaya Penginapan Pendampingan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp7.133.000,00 dengan nomor NTPN D541148VURSLPGTO tanggal 11 Februari 2022.
 - n. Pengembalian sisa uang taksi BPD Diseminasi/Rediseminasi pengukuran ketahanan Nasional di Prov.Sumatera Selatan sebesar Rp36.000,00 dengan nomor NTPN 30FC248VURSLPQMS tanggal 11 Februari 2022.
 - o. Pengembalian uang representasi Taprof pada kegiatan SLISN PPRA LXII sebesar Rp3.800.000 (Temuan BPK RI TA. 2021) sebesar Rp3.800.000,00 dengan nomor NTPN 4C7AE3CIF1GG3VRP tanggal 18 April 2022.
 - p. Pengembalian Belanja Barang Pencegahan Penyebaran Covid-19 nomor BA/1080/XI/2021 tanggal 5 November 2021 sesuai dengan hasil Reviu Inspektorat Lemhannas RI Tahun 2021 sebesar Rp74.776.000,00 dengan nomor NTPN C859A48VUS2TIQGG tanggal 20 April 2022.
 - q. Pengembalian Belanja Barang Kelebihan Pembayaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas Biro Umum Tahun 2021 (Temuan BPK RI TA.2021) sebesar Rp4.675.000,00 dengan nomor NTPN 42F940N9VHPD3R6C tanggal 21 April 2022.
 - r. Pengembalian Kelebihan pembayaran belanja barang atas pembangunan atap shelter tahun 2021 oleh PT. Jaya Pratama Mandiri (Temuan BPK RI) sebesar Rp35.058.800,00 dengan nomor NTPN 7C5272G4V70QVC5A tanggal 10 Mei 2022.
 - s. Pengembalian kelebihan belanja barang atas kekurangan volume pekerjaan pasang keramik dinding dan lantai tahun 2021 oleh CV. Semanggi Jaya (Temuan BPK RI) sebesar Rp3.918.800,00 dengan nomor NTPN 7A6B248VUS5JPD4A tanggal 10 Mei 2022
 - t. Pengembalian kelebihan belanja barang pembangunan struktur shelter tahun 2021 oleh CV. Semanggi Jaya (Temuan BPK RI) sebesar Rp11.795.400,00 dengan nomor NTPN D71B348VUS5JPCG0 tanggal 11 Mei 2022.
 - u. Pengembalian Kegiatan JGF Tahun 2018 (Temuan BPK RI) sebesar Rp10.000.000,00 dengan nomor NTPN 833936U8EC2RJEL9 tanggal 14 Juli 2022.
6. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp45.500.000,00

merupakan Pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal sistem monitoring jaringan tahun 2021 oleh PT. Siber Sinergi Teknologi (Temuan BPK RI) dengan nomor NTPN C19538N3E11K2VQ3 tanggal 13 Mei 2022.

Realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar 55,05% dikarenakan adanya relaksasi sewa dari Kementerian Keuangan untuk Sewa Dwi Warna sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.6/KNL.0704/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, kekurangan pembayaran sewa koperasi oleh Koperasi Primer Lemhannas RI sebesar Rp47.633.750,00 sesuai dengan Surat Nomor: SPS/01/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Antara Lembaga Ketahanan Nasional RI dengan Koperasi Primer Lemhannas RI membuat realisasi pendapatan tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja

Rp176.916.570.241,00

Sampai dengan pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*), Lemhannas RI telah melakukan sejumlah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 4 kali dari DIPA awal sebesar Rp181.552.556.000,00.

Pada dasarnya, revisi ini tidak mengurangi pagu awal. Namun, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2022, terdapat sejumlah anggaran Lemhannas RI yang diblokir sehingga anggaran tersebut tidak dapat dicairkan. Pemblokiran ini merupakan kebijakan untuk menggantikan langkah *refocusing* anggaran sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Pagu anggaran Lemhannas RI per 31 Desember 2022 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.6 Revisi dan Blokir Pagu Anggaran Lemhannas RI
s.d. 31 Desember 2022**

Uraian	Daftar Revisi dan Blokir Pagu Anggaran s.d. 30 Sept 2022				
	DIPA Awal	Revisi	DIPA Akhir	<i>Automatic Adjustment/Pagu Blokir</i>	Pagu Anggaran yang Tersedia
Belanja Pegawai	78.251.739.000,00	1.705.685.000,00	79.957.424.000,00	0,00	79.957.424.000,00
Belanja Barang	101.132.109.000,00	0,00	101.132.109.000,00	(3.098.422.000,00)	98.033.687.000,00
Belanja Modal	2.168.708.000,00	0,00	2.168.708.000,00	(1.004.210.000,00)	1.164.498.000,00
Total Belanja	181.552.556.000,00	0,00	183.258.241.000,00	(4.102.632.000,00)	179.155.609.000,00

Realisasi Belanja Lemhannas RI per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.916.570.241,00 atau 98,75% dari anggaran belanja sebesar Rp179.155.609.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode s.d. 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Rincian Realisasi Belanja periode
s.d. 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Periode s.d. 31 Desember 2022			Periode s.d. 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	% Real Angg.	Realisasi (Dalam Rupiah)	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	79.957.424.000,00	79.745.787.714,00	99,74	71.561.292.268,00	11,44
Belanja Barang	98.033.687.000,00	97.741.248.463,00	99,70	76.955.334.236,00	27,01
Belanja Modal	1.164.498.000,00	1.120.408.341,00	96,21	6.602.687.659,00	(83,03)
Pengembalian Belanja Pegawai		(66.766.878,00)	?	(494.681.006,00)	(86,50)
Pengembalian Belanja Barang		(1.624.107.399,00)	?	(349.225.370,00)	365,06
Pengembalian Belanja Modal		0,00	?	0,00	-
Total Belanja	179.155.609.000,00	176.916.570.241,00	98,75	154.275.407.787,00	14,68

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami total kenaikan sebesar 14,68% dibandingkan dengan realisasi belanja per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena:

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 11,44% disebabkan adanya pemberian tunjangan fungsional yang baru diberikan tahun 2022 serta kenaikan tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.
2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar 27,01% disebabkan karena adanya kenaikan pagu belanja barang dan perjalanan dinas tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.
3. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 83,03% disebabkan karena adanya penurunan pagu belanja modal TA. 2022 dibandingkan tahun 2021.

Sedangkan realisasi belanja (neto) berdasarkan program periode 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Rincian Anggaran dan Realisasi per Program
s.d. 31 Desember 2022**

PROGRAM	per 31 Desember 2022		%
	ANGGARAN (Dalam Rupiah)	REALISASI (Dalam Rupiah)	
Program Pembinaan Ketahanan Nasional	45.802.671.000,00	44.032.681.313,00	96,14
Program Dukungan Manajemen	133.352.938.000,00	132.883.888.928,00	99,65
Total Belanja	179.155.609.000,00	176.916.570.241,00	98,75

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Lembaga Ketahanan Nasional RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp8.007.387.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.297.069.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target (Renstra)	Target (Laporan Capaian Output)	Capaian Output Strategis	%Capaian Berdasarkan Renstra	% Capaian Output
Kedeputian Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	2.858.856.000,00	2.606.906.248,00	91,19	Orang	500	500	500	100	100
	Training of Trainers (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	3.527.994.000,00	3.325.415.363,00	94,26	Orang	500	500	500	100	100
	Dialog Wawasan Kebangsaan	1.620.537.000,00	1.364.748.116,00	84,22	Orang	400	200	200	50	100
TOTAL		8.007.387.000,00	7.297.069.727,00	91,13		1400	1200	1200	85,71	100

Target dan alokasi Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi/DialogWawasan Kebangsaan diubah menjadi 200 orang dengan anggaran Rp1.620.537.000,00. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebagian secara tatap muka dan virtual dalam rangka protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Lampiran I Catatan Penetapan Rincian Output Prioritas Pagu Indikatif RKP 2022 Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Sesuai dengan Bab IV Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga (K/L) perlu menyajikan Informasi output strategis/prestasi kerja, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Informasi output strategis/prestasi kerja ini merupakan informasi yang bersifat umum, mencakup prestasi kerja K/L yang utama atau yang signifikan berdasarkan informasi yang akan disajikan dalam Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (LKjKL).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2020-2024, Lemhannas menetapkan Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Pencapaian Output sebagai berikut:

Tabel 5.10 Laporan Realisasi Output Prioritas Lemhannas RI Tahun Anggaran 2022

No.	Output Prioritas	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output DIPA	Realisasi Output DIPA	% Target
1	Pelaksanaan Pendidikan Pimpinan Tingkat Tinggi (Orang)	28.020.610.000	27.365.744.041	97,66%	200	200	100%
2	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Orang)	8.785.162.000	7.821.893.719	89,04%	1200	1200	100%
3	Pelaksanaan Pengkajian Strategis (Dokumen)	6.358.304.000	6.254.646.868	98,37%	23	23	100%
4	Pelaksanaan Program Laboratorium dan Pengukuran Ketahanan Nasional (Dokumen)	2.638.595.000	2.590.396.685	98,17%	48	48	100%

Informasi rinci mengenai kinerja/prestasi kerja ini dijelaskan dalam LKjKL Lemhannas RI Tahun 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Lemhannas RI telah menganggarkan serta

merealisasikan sejumlah belanja guna penanggulangan pandemi covid-19, antara lain:

**Tabel 5.11 Rincian Anggaran dan Realisasi per Akun Belanja Covid-19
s.d. 31 Desember 2022**

Akun Belanja	per 31 Desember 2022		%
	ANGGARAN (Dalam Rupiah)	REALISASI (Dalam Rupiah)	
521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	1.284.374.000,00	1.254.480.705,00	97,67
Total Belanja	1.284.374.000,00	1.254.480.705,00	97,67

Dalam realisasi belanja barang operasional per 31 Desember 2022, terdapat realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 (Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19) Kode Akun 521131 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.254.480.705,00 atau 97,67% dari anggaran sebesar Rp1.284.374.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian barang-barang pencegahan covid 19 seperti alat PCR Swab, Rapid Antigen, multivitamin, dll termasuk paket data dan aplikasi lisensi zoom.

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp79.679.020.836,00*

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp79.679.020.836,00 dan Rp71.066.611.262,00 dengan rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Desember 2022				per 31 Desember 2021		
	Anggaran (dalam rupiah)	Realisasi Bruto (Dalam Rupiah)	Pengembalian Belanja (dalam rupiah)	Realisasi Netto (dalam rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	33.106.819.000,00	33.050.503.610,00	65.415.878,00	32.985.087.732,00	99,83	32.925.155.150,00	0,38
Belanja Honor Tetap	3.960.000.000,00	3.900.000.000,00	-	3.900.000.000,00	98,48	3.885.000.000,00	0,39
Belanja Lembur	400.000.000,00	399.884.000,00	-	399.884.000,00	99,97	399.944.450,00	(0,02)
Belanja Tunjangan Khusus	42.490.605.000,00	42.395.400.104,00	1.351.000,00	42.394.049.104,00	99,78	33.856.511.662,00	25,22
Jumlah	79.957.424.000,00	79.745.787.714,00	66.766.878,00	79.679.020.836,00	99,74	71.066.611.262,00	12,21

Realisasi Belanja Pegawai Tahun per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,12% yang disebabkan:

1. Kenaikan Belanja Tunjangan Khusus sebesar 25,22% disebabkan adanya pemberian tunjangan fungsional yang baru diberikan tahun 2022 serta kenaikan tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.
2. Penambahan sejumlah personel Lemhannas RI.

Pengembalian Belanja Pegawai sejumlah Rp66.766.878,00 terdiri dari:

1. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Maret 2022 karena pindah atas nama Mohamad Rohadi sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN 302325209MVNFDI3 tanggal 17 Maret 2022.
2. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Maret 2022 karena pindah atas nama Sutanto S sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN F22438JM919939OL

tanggal 17 Maret 2022

3. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Maret 2022 karena pindah atas nama Emil Syarif sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN 373012CNQ78I87U0 tanggal 17 Maret 2022.
4. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Maret 2022 karena Pensiun tmt 1 Maret 2022 an Albiner Sitompul sebesar Rp3.250.000,00 dengan nomor NTPN 235ED8JM91993MLP tanggal 17 Maret 2022.
5. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Maret 2022 karena pindah atas nama Gatot Sutomo sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN 781655UDPHI3S95Q tanggal 17 Maret 2022.
6. Pengembalian Gaji Induk bulan Maret 2022 karena Hukuman Disiplin bulan Februari dan Maret 2022 an Netty Samosir sebesar Rp3.223.800,00 dengan nomor NTPN 87A0A1GAACM7OTBB tanggal 18 Mei 2022
7. Pengembalian Gaji Induk bulan Mei 2022 karena mengundurkan diri tmt 1 Mei 2022 an ALDILAH AYU sebesar Rp3.083.000,00 dengan nomor NTPN D12277N8P6MUJSTG tanggal 18 Mei 2022.
8. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Mei 2022 karena pindah atas nama RADEN DJAENUDIN sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN 4EEE28JM919BQLL3 tanggal 2 Juni 2022.
9. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Mei 2022 karena pindah an BUDI SANTOSO sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN CF013395A1R1CPHJ tanggal 2 Juni 2022.
10. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Mei 2022 karena pindah an ARIF PURWO HANDOKO sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN B34E61GAACM8IK93 tanggal 2 Juni 2022.
11. Pengembalian Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Mei 2022 karena pindah an IWAN RUDIWAN sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN 0DB676QR9C4J0P99 tanggal 2 Juni 2022.
12. Pengembalian Gaji Induk bulan Maret sd Juni 2022 karena pemberhentian dari jabatan fungsional an WIDIYANTO sebesar Rp3.340.000,00 dengan nomor NTPN DDBDD7N8P6MVH804 tanggal 14 Juni 2022.
13. Pengembalian Gaji Juni 2022 dikarenakan absen selama masa CPNS an Satrio Pamungkas sebesar Rp1.899.400,00 dengan nomor NTPN 98F601GAACM9IOTB tanggal 7 Juli 2022.
14. Pengembalian Belanja Pegawai Gaji Induk Mei 2022 dan THR Tukin 2022 karena absen selama masa CPNS an Satrio Pamungkas sebesar Rp3.250.400,00 dengan nomor

NTPN 55E290JSQI3T6TCC tanggal 11 Juli 2022.

15. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Dipekerjakan bulan Juli dan Agustus 2022 an ACHMAD MARZUKI sebesar Rp11.000.000,00 dengan nomor NTPN 8D8FA5UDPHI8HAFU tanggal 4 Agustus 2022.
16. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Diperkerjakan bulan Juli 2022 an BENNY PRABOWO sebesar Rp1.260.000,00 dengan nomor NTPN EC9B25UDPHI8HDKI tanggal 4 Agustus 2022.
17. Pengembalian Belanja Tunjangan Pegawai bulan Juli 2022 Muhamad Rusli sebesar Rp3.250.000,00 dengan nomor NTPN 20DBA2CNQ78N3EEE tanggal 29 Agustus 2022.
18. Pengembalian Uang Makan bulan Juli 2022 dikarenakan sudah pensiun an Irham Zaeni sebesar Rp738.150,00 dengan nomor NTPN 55F671GAACMBJ8AN tanggal 19 September 2022.
19. Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan bulan Juli 2022 dikarenakan sudah pensiun an Sri Widati sebesar Rp731.850,00 dengan nomor NTPN BCCDF0JSQI3V69NM tanggal 19 September 2022
20. Pengembalian Uang Makan bulan Juli 2022 dikarenakan sudah pensiun an Kamilin sebesar Rp738.150,00 dengan nomor NTPN B7D631GAACMBJADJ tanggal 19 September 2022.
21. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp888,00.
22. Potongan Belanja Tunj. Struktural PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Periode bulan Agustus s.d. Oktober 2022 untuk 10 pegawai a.n. Indah Pratiwi Roring dkk sebesar Rp3.635.150,00 dengan nomor SP2D 221751301053757 tanggal 2 Desember 2022.
23. Potongan Belanja Tunj. Struktural PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Tunjangan Jabatan Fungsional untuk 22 pegawai a.n. drg. PRISCILLIA SITORUS dkk sebesar Rp8.091.040,00 dengan nomor SP2D 221751301009710 tanggal 6 April 2022
24. Potongan Belanja Tunj. Struktural PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Periode Bulan Februari s.d. Mei 2022 untuk 22 pegawai a.n. Afyudin Mubarak, S.Kom dkk sebesar Rp4.320.000,00 dengan nomor SP2D 221751301020197 tanggal 7 Juni 2022.
25. Potongan Belanja Tunj. Struktural PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji bulan Maret dan April 2022 untuk 5 pegawai a.n. MUHAMMAD AINUDDINSYAH sebesar Rp1.095.050,00 dengan nomor SP2D 221751301012092 tanggal 18 April 2022
26. Potongan Belanja Tunj. Struktural PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan

THR 2022 untuk 9 pegawai a.n. Edy Rusminandar, S.E., M.A. dkk sebesar Rp540.000,00 dengan nomor SP2D 221751301023902 tanggal 24 Juni 2022.

27. Potongan Belanja Tunj. Struktural PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan April dan Mei 2022 untuk 9 pegawai a.n. Edy Rusminandar, SE, MA dkk sebesar Rp1.080.000,00 dengan nomor SP2D 221751301020198 tanggal 7 Juni 2022.

28. Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan THR Tahun 2022 Untuk 25 Pegawai a.n. Afyudin Mubarak, S.Kom dkk. sebesar Rp2.160.000,00 dengan nomor SP2D 221751301024805 tanggal 30 Juni 2022.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp96.117.141.000,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp96.117.141.064,00 dan Rp76.606.108.866,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 21,41% dibandingkan tahun 2021.

Tabel 5.13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Desember 2022				per 31 Desember 2021		
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Pengembalian Belanja (dalam rupiah)	Realisasi Netto (dalam rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	10.591.937.000,00	10.524.307.036,00	500.000,00	10.523.807.036,00	99,36	6.286.377.788,00	67,41
Belanja Barang Non Operasional	32.421.939.000,00	31.958.044.816,00	9.487.000,00	31.948.557.816,00	98,57	27.397.613.891,00	16,65
Belanja Jasa	24.343.938.000,00	23.770.402.057,00	4.957.500,00	23.765.444.557,00	97,64	21.362.361.346,00	11,27
Belanja Pemeliharaan	11.579.743.000,00	11.576.531.562,00	30.400,00	11.576.501.162,00	99,97	14.614.588.779,00	(20,79)
Belanja Persediaan	531.847.000,00	531.770.905,00	0,00	531.770.905,00	99,99	540.459.626,00	(1,61)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.652.096.000,00	18.471.206.916,00	1.609.132.499,00	16.862.074.417,00	104,64	6.297.127.436,00	193,33
Belanja Perjalanan Luar Negeri	516.087.000,00	515.155.721,00	0,00	515.155.721,00	99,82	0,00	∞
Belanja Barang Lainnya u/Diserahkan kpd Masyarakat	396.100.000,00	393.829.450,00	0,00	393.829.450,00	99,43	107.580.000,00	266,08
Jumlah Total	98.033.687.000,00	97.741.248.463,00	1.624.107.399,00	96.117.141.064,00	99,70	76.606.108.866,00	27,59

Terdapat kenaikan signifikan dalam sejumlah belanja dibandingkan dengan realisasi tahun lalu diakibatkan adanya kenaikan anggaran belanja. Berikut ini perbandingan data anggaran sejumlah belanja yang mengalami kenaikan signifikan, antara lain:

Tabel 5.14 Perbandingan Anggaran sejumlah Belanja Barang yang mengalami kenaikan signifikan

URAIAN	ANGGARAN		Naik/Turun (%)
	2022	2021	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.652.096.000,00	6.767.279.000,00	160,84
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	516.087.000,00	-	∞
Belanja Barang Lainnya u/Diserahkan kepada Masyarakat	396.100.000,00	108.000.000,00	266,76

Kenaikan anggaran perjalanan dinas tahun 2022 karena aturan perjalanan dinas yang sudah longgar sebagai akibat dari penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Terdapat realisasi Belanja Barang Lainnya u/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp393.829.450,00. Berdasarkan hasil temuan Inspektorat Lemhannas RI, penggunaan akun belanja tersebut kurang sesuai sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian dalam Laporan Operasional Tahun 2022 (*Audited*) melalui Modul SAKTI Persediaan.

Adapun pengembalian belanja barang sebesar Rp1.624.107,399,00 terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Barang Operasional sebesar Rp500.000,00

merupakan Pengembalian belanja barang paket data internet evaluasi dampak pelaksanaan Training of Trainer Nilai Nilai Kebangsaan secara virtual dengan nomor NTPN 175686QR9C4KU8RP tanggal 4 Agustus 2022.

2. Pengembalian Belanja Barang non Operasional sebesar Rp9.487.000,00 merupakan pengembalian uang makan konsumsi peserta PPRA angkatan 64 Tahun 2022 dengan nomor NTPN B3A5C395A1R6DHO9 tanggal 29 November 2022.
3. Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp4.957.500,00 terdiri dari:
 - 1) Pengembalian Belanja Barang Honor Saji Taskap PPRA 64 Tahun 2022 an Budi Sulistiyono Bambang Darjanto dan Muhamad Hanafi sebesar Rp2.407.500,00 dengan nomor NTPN 6D1550JSQI41262Q tanggal 15 November 2022
 - 2) Pengembalian Belanja Barang Pembayaran Honorarium FGD Kajian Jangka Panjang Ditjian Hankam dan Geografi Debidjianstrat sebesar Rp255.000,00 dengan nomor NTPN 0B70F45IPSDJLLJ4 tanggal 12 Desember 2022.
 - 3) Pengembalian Belanja Barang Honorarium Penyusunan Naskah Awal Kajian Jangka Panjang Ditjian Hankam dan Geografi Debidjianstra sebesar Rp2.295.000,00 dengan nomor NTPN B1612395A1R76O0T tanggal 12 Desember 2022.
4. Pengembalian Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan AC di lingkungan Lemhannas RI Tahun 2022 oleh CV Semanggi Jaya sebesar Rp30.400,00 dengan nomor NTPN 1D2EB6QR9C4I48VR tanggal 9 Mei 2022.
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp1.609.132.499,00 terdiri dari:
 - 1) Pengembalian BPD Tim Koordinasi Awal Giat TOT Taplai di Prov Riau Tanggal 8 sd 10 Februari 2022 sebesar Rp2.790.000,00 dengan nomor NTPN 42D246QR9C4FDC09 tanggal 24 Februari 2022.
 - 2) Pengembalian Dana Perjalanan Dinas Biro Kerma dan Hukum Monitoring dan Evaluasi Program LIUN ke UGM Yogyakarta sebesar Rp12.072.000,00 dengan nomor NTPN 6DE881GAACM5N7K1 tanggal 2 Maret 2022.
 - 3) Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas Tim Aju Pelaksanaan Kegiatan ToT Taplai di Provinsi Riau tanggal 6 sd 19 Maret 2022 sebesar Rp1.367.400,00 dengan nomor NTPN 1C3E66QR9C4GBU73 tanggal 24 Maret 2022.
 - 4) Pengembalian giat TOT Taplai bagi dosen guru widyaiswara d riau an Prasetya N dkk sebesar Rp11.836.100,00 dengan nomor NTPN B37C10JSQI3PIB9M tanggal 29 Maret 2022.
 - 5) Pengembalian BPD Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Taplai dan ToT Taplai di Riau tahun 2022 sebesar Rp1.367.400,00 dengan nomor

NTPN 58A467N8P6MTHEAC tanggal 5 April 2022.

- 6) Pengembalian BPD Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Taplai dan ToT Taplai di Bali Tahun 2022 sebesar Rp792.000,00 dengan nomor NTPN 298287N8P6MTHJ7S tanggal 5 April 2022.
- 7) Pengembalian Uang Representasi dan Tiket Pesawat BPD Giat Sosialisasi Pergub No 02 Tahun 2020 sebesar Rp1.859.000,00 dengan nomor NTPN 3AB77395A1QVKORV tanggal 19 April 2022
- 8) Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas Tim Koord Awal Giat Training of Trainers Taplai bagi dosen guru dan widyaiswara sebesar Rp8.497.800,00 dengan nomor NTPN 1A1FF1GAACM6RGG5 tanggal 21 April 2022.
- 9) Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas Tim Panitia Pelaksanaan Giat Pelatihan untuk pelatih ToT Taplai bagi Dosen guru dan widyaiswara sebesar Rp7.446.100,00 dengan nomor NTPN 306CA0JSQI3QE006 tanggal 22 April 2022.
- 10) Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas Tim Narasumber Pelaksanaan Giat Pelatihan untuk pelatih sebesar Rp13.002.600,00 dengan nomor NTPN 1AC760JSQI3QES24 tanggal 22 April 2022.
- 11) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Quality Assurance pada kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri sebesar Rp2.470.700,00 dengan nomor NTPN D6191395A1QVMLHR tanggal 26 April 2022.
- 12) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa PPRA LXIII Pelaksanaan SSDN Seluruh Provinsi tanggal 1 Maret 2022 ke Provinsi Aceh sebesar Rp285.027.930,00 dengan nomor NTPN 6D4AF8JM919B2N1R tanggal 25 Mei 2022.
- 13) Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka sebagai petugas tim pengukuran hasil pendidikan evaluasi dampak sebesar Rp473.600,00 dengan nomor NTPN 403C02CNQ78L105G tanggal 7 Juni 2022.
- 14) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biaya Hotel Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Taplai di Pontianak Kalbar sebesar Rp2.004.000,00 dengan nomor NTPN D845245IPSDEU0AS tanggal 21 Juli 2022.
- 15) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biaya Pesawat Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Taplai di Pontianak Kalbar sebesar Rp1.768.400,00 dengan nomor NTPN B30587N8P6N0I1N2 tanggal 21 Juli 2022.
- 16) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Hotel dan Pesawat Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Taplai di Balikpapan Kaltim sebesar Rp1.956.900,00 dengan nomor NTPN AFE462CNQ78M4354 tanggal 21 Juli 2022.
- 17) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tim Narsum Pelaksanaan Giat ToT Taplai

di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp10.583.700,00 dengan nomor NTPN 14B096QR9C4K6MIJ tanggal 27 Juli 2022.

- 18) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tim Panitia Pelaksanaan Giat Pelatihan ToT Taplai bagi Dosen Guru dan Widyaiswara sebesar Rp7.189.000,00 dengan nomor NTPN AB87D0JSQI3TC5V6 tanggal 28 Juli 2022.
- 19) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tim Aju dan Pelaksanaan Kegiatan ToT Taplai bagi Dosen Guru dan Widyaiswara sebesar Rp3.372.000,00 dengan nomor NTPN 5B325395A1R2J1JT tanggal 28 Juli 2022.
- 20) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Talkshow Wasbang di Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp5.161.400,00 dengan nomor NTPN C16F52CNQ78M64F4 tanggal 28 Juli 2022.
- 21) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Talkshow Wasbang di Provinsi Bali tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp1.586.000,00 dengan nomor NTPN 58F976QR9C4K6VGR tanggal 28 Juli 2022.
- 22) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Peliputan Kegiatan ToT di Provinsi Riau tanggal 8 sd 18 Maret 2022 sebesar Rp911.600,00 dengan nomor NTPN BEF202CNQ78M63CE tanggal 28 Juli 2022.
- 23) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Peliputan Kegiatan ToT di Provinsi Bali tanggal 22 sd 29 Maret 2022 sebesar Rp9.067.800,00 dengan nomor NTPN 2858F2CNQ78M641C tanggal 28 Juli 2022.
- 24) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket Narasumber Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.265.400,00 dengan nomor NTPN 700BC8JM919DNUFB tanggal 3 Agustus 2022.
- 25) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Talkshow di Pontianak Tgl 5 sd 7 Juni 2022 sebesar Rp3.434.700,00 dengan nomor NTPN 68D9E45IPSDFNDPQ tanggal 4 Agustus 2022.
- 26) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Talkshow di Balikpapan Tgl 20 sd 21 Juni 2022 sebesar Rp1.537.200,00 dengan nomor NTPN AC2FD5209MVS4D65 tanggal 4 Agustus 2022.
- 27) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Peliputan di Pontianak Tgl 6 sd 15 Juni 2022 sebesar Rp1.814.600,00 dengan nomor NTPN 16DD145IPSDFN93Q tanggal 4 Agustus 2022.
- 28) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Kegiatan Peliputan di Balikpapan tgl 19 Juni sd 1 Juli 2022 sebesar Rp2.034.300,00 dengan nomor NTPN F87C38JM919DOCVN tanggal 4 Agustus 2022.
- 29) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas SLISN PPRA 63 Tahun 2022 ke

Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Barat sebesar Rp406.455.860,00 dengan nomor NTPN 4C82745IPSDFOQ6E tanggal 9 Agustus 2022.

- 30) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas dalam rangka sebagai Petugas Tim Pengukuran Hasil Pendidikan Evaluasi Dampak sebesar Rp603.300,00 dengan nomor NTPN 06D3045IPSDGKS20 tanggal 1 September 2022.
- 31) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas kegiatan SSDN PPRA LXIV Prov Sulawesi Tengah Jawa Timur Sulawesi Utara dan Maluku sebesar Rp210.264.853,00 dengan nomor NTPN 3D0698JM919ENQHH tanggal 7 September 2022.
- 32) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas kegiatan SLISN PPRA LXIV Prov Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Kep Bangka Belitung sebesar Rp442.247.738,00 dengan nomor NTPN 1B2D98JM919EPIV5 tanggal 14 September 2022.
- 33) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Tim Pelaksana Giat Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Provinsi Bali sebesar Rp48.870.000,00 dengan nomor NTPN EC4695UDPHI9MJ7O tanggal 27 September 2022.
- 34) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Tim Pelaksana Kegiatan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp12.283.400,00 dengan nomor NTPN 2A8647N8P6N38748 tanggal 10 Oktober 2022.
- 35) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Hotel serta Tiket Tim Aju dan Tim Pelaksana dalam rangka evaluasi dampak taplai sebesar Rp19.944.000,00 dengan nomor NTPN 30AA88JM919FNI65 tanggal 11 Oktober 2022.
- 36) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas SLISN PPRA LXIII Provinsi Bali tahun 2022 sebesar Rp250.000,00 dengan nomor NTPN 44D568JM919FRGEF tanggal 24 Oktober 2022.
- 37) Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Memacu Kreativitas dan Kinerja Tenaga Pendukung Pendidikan sebesar Rp14.820.000,00 dengan nomor NTPN FA0D50JSQI410B7C tanggal 9 November 2022.
- 38) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Dialog Kebangsaan di Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.159.000,00 dengan nomor NTPN D6FCF395A1R67KG1 tanggal 10 November 2022.
- 39) Pengembalian Pengadaan paket Halfday Giat Pengumpulan data Kajian Strategik jangka panjang Dit Ideopol Dejian TA 2022 sebesar Rp5.104.000,00 dengan nomor NTPN C11311GAACMDHNOT tanggal 24 November 2022.
- 40) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket Tim Koordinasi Awal Kegiatan

Dialog Wawasan Kebangsaan di Prov Bengkulu sebesar Rp2.951.704,00 dengan nomor NTPN 6C8911GAACMEB8V7 tanggal 7 Desember 2022.

- 41) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket Tim Aju Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan di Prov Bengkulu sebesar Rp4.547.498,00 dengan nomor NTPN 4528C2CNQ78QOBM4 tanggal 7 Desember 2022.
- 42) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket Tim Narasumber Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan di Prov Bengkulu sebesar Rp6.955.390,00 dengan nomor NTPN EFC210JSQI41UF9M tanggal 8 Desember 2022.
- 43) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket Tim Narasumber DK DAK Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan di Prov Bengkulu sebesar Rp4.075.998,00 dengan nomor NTPN 4528C2CNQ78QOBM4 tanggal 8 Desember 2022.
- 44) Pengembalian Belanja Barang perjalanan dinas refreshment tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan sebesar Rp2.590.000,00 dengan nomor NTPN 9F8C6395A1R77K1P tanggal 19 Desember 2022.
- 45) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Giat Benchmarking Ke Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp7.242.800,00 dengan nomor NTPN 2E78F0JSQI420L5K tanggal 21 Desember 2022.
- 46) Pengembalian Belanja Barang Perjalanan Dinas Tim Aju Benchmarking ke Lembaga Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp880.000,00 dengan nomor NTPN C5FDF5UDPHICEKPA tanggal 21 Desember 2022.
- 47) Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tiket dan Hotel Tim Pelaksana Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan di Prov Bengkulu sebesar Rp12.292.572,00 dengan nomor NTPN DC3020JSQI422L8S tanggal 21 Desember 2022.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp1.120.408.341,00

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.120.408.341,00 dan Rp6.602.687.659,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 83,03% dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena adanya penurunan pagu belanja modal tahun 2022.

Tabel 5.15 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.000.000,00	213.000.000,00	99,07	4.675.794.547,00	(95,44)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	934.938.620,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	949.498.000,00	907.408.341,00	95,57	991.954.492,00	(8,52)
Jumlah Belanja Kotor	1.164.498.000,00	1.120.408.341,00	96,21	6.602.687.659,00	(83,03)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja	1.164.498.000,00	1.120.408.341,00	96,21	6.602.687.659,00	(83,03)

*Belanja Modal
Tanah RpNihil*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RpNihil tidak mengalami perubahan.

**Tabel 5.16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

URAIAN	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp213.000.000,00*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp213.000.000,00 dan Rp4.675.794.547,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 95,44% dibandingkan realisasi tahun 2021 dikarenakan pagu alokasi anggaran Tahun 2022 untuk belanja modal Peralatan dan Mesin mengalami Penurunan.

**Tabel 5.17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

URAIAN	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.000.000,00	213.000.000,00	99,07	2.764.485.312,00	(92,30)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	0,00	0,00	1.911.309.235,00	(100,00)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	215.000.000,00	213.000.000,00	99,07	4.675.794.547,00	(95,44)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja	215.000.000,00	213.000.000,00	99,07	4.675.794.547,00	(95,44)

Perolehan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp213.000.000,00 terdiri dari:

1. Pengadaan perangkat layer interaktif Pusat Laboratorium Lemhannas RI sebesar Rp29.000.000,00 dan tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nomor NUP 3.05.01.01.05.058.51.
2. Pengadaan alat fitness Lemhannas RI TA. 2022 sebesar Rp184.000.000,00 dan tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nomor NUP 3.19.01.03.005.1-3.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
RpNihil*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar RpNihil. Hal ini disebabkan belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) termasuk dalam pencantuman blokir sesuai

dengan Surat Menteri Keuangan RI nomor: S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

Tabel 5.18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.190.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.190.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja	1.190.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan RpNihil

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar RpNihil dan Rp934.938.620,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 100% dibanding tahun 2021 dikarenakan tidak adanya pagu belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2021. Berikut adalah rincian belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan per 30 Juni 2022 dan 2021

Tabel 5.19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	-	934.938.620,00	-100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	-	934.938.620,00	-100,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00	934.938.620,00	-100,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp907.408.341,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp907.408.341,00 dan Rp991.954.492,00. Realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 8,52%.

Tabel 5.20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Desember 2022			per 31 Desember 2021	
	Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi (Dalam Rupiah)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	949.498.000,00	907.408.341,00	95,57	991.954.492,00	(8,52)
Jumlah Belanja Kotor	949.498.000,00	907.408.341,00	95,57	991.954.492,00	(8,52)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah Belanja	949.498.000,00	907.408.341,00	95,57	991.954.492,00	(8,52)

Belanja modal lainnya sebesar Rp907.408.341,00 terdiri dari:

1. Pengadaan *Secure Socket Layer (SSL) Certificate* untuk domain *lemhannas.go.id* sebesar Rp27.800.000,00. Berdasarkan hasil temuan Inspektorat Lemhannas RI, terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan akun belanja modal (seharusnya belanja barang). Atas dasar tersebut, akan dilakukan penyesuaian atas penggunaan akun belanja.
2. Pengadaan Buku Perpustakaan sebesar Rp49.762.500 dengan NUP 6.01.01.01.999.2500-2551.
3. Pengadaan Update Aplikasi Siskurtanas (Pengukuran IKN dan Integrasi Data) Tahap VII di 2 Provinsi sebesar Rp829.845.841,00, dengan NUP 8.01.01.01.001.1.

Adapun pemetaan hasil belanja modal lainnya terhadap aset tak berwujud atau aset tetap lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2022**

Uraian	Jumlah	Nilai Aset yang Bertambah		
		Aset Tak Berwujud		Aset Tetap
		Software	Lisensi	Aset Tetap Lainnya
Pengadaan SSL Certificate domain Lemhannas.go.id	27.800.000,00	27.800.000,00	-	-
Pengadaan Buku Perpustakaan	49.762.500,00	-	-	49.762.500,00
Pengadaan Aplikasi Siskurtanas Tahap VII di 2 Provinsi	829.845.841,00	829.845.841,00		
TOTAL	907.408.341,00	857.645.841,00	-	49.762.500,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran RpNihil

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disimpan dalam rekening PT. BRI Persero nomor 059601000574307 a.n. BPG175.LEMHANAS RI dan 6504963205051000 a.n. BPG 175 LEMHANNAS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar RpNihil. Saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas RpNihil

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran yang disimpan dalam rekening PT. BRI Persero nomor 059601000574307 a.n. BPG175.LEMHANAS RI dan 6504963205051000 a.n. BPG 175 LEMHANNAS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar RpNihil. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah didefinisikan dalam Lampiran PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

C.3 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka

Belanja Barang yang Dibayar Dimuka Rp200.766.093,00

Saldo Belanja Barang yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp200.766.093,00 dan Rp339.608.713,00. Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memmanfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Adapun rincian Belanja Barang yang Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Barang yang Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
Saldo per 1 Januari	339.608.713,00	-
Mutasi tambah:	-	-
Pengadaan	200.766.093,00	339.608.713,00
Total Mutasi Tambah	200.766.093,00	339.608.713,00
Mutasi Kurang:	339.608.713,00	-
Total Mutasi Kurang	339.608.713,00	-
Saldo per tanggal 31 Des	200.766.093,00	339.608.713,00

Saldo sebesar Rp200.766.093,00 terdiri dari:

1. Jurnal Penyesuaian atas Belanja Pengadaan Jasa Fortinet yang lebih dari setahun s.d. Mei 2023 sehingga diakui sebagai Belanja Dibayar Di Muka dengan Nomor SP2D 221751302023655 (Jurnal 31 Desember 2022) sebesar Rp115.833.333,00.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor SPPP/09/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 antara PPK atas nama Kepala Biro Telematika Settama Lemhannas RI dengan PT Smarthub Technologies perihal Pengadaan Perpanjangan Lisensi Fortinet Lemhannas RI TA 2022, Lemhannas RI merealisasikan pembayaran jasa Fortinet tersebut sebesar Rp278.000.000,00 untuk periode satu tahun, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2022 s.d. 30 Mei 2023, sesuai dengan dengan nomor SPM 02294T/632505/2022 dan Nomor SP2D 221751302023655 tanggal 03 Agustus 2022. Atas realisasi pembayaran perpanjangan jasa lisensi Fortinet tersebut, maka pada tahun 2022 Lemhannas RI:

- a) Mengakui, mencatat, dan menyajikan sebesar Rp162.166.666,67, atau terhitung dari tanggal 01 Juni 2022 s.d. 31 Desember 2022 (7/12 bulan x Rp278.000.000,00), sebagai Belanja Barang Jasa pada LRA Lemhannas RI per 31 Desember 2022 dan Beban Belanja pada LO Lemhannas per 31 Desember 2022;
 - b) Mengakui, mencatat, dan menyajikan nilai Rp115.833.333,33 (Rp278.000.000,00 - Rp162.166.666,67) atau terhitung dari tanggal 01 Januari 2023 s.d. 30 Mei 2023 (5/12 x Rp278.000.000,00), sebagai saldo Belanja Dibayar di Muka pada Neraca per 31 Desember 2022.
2. Jurnal Penyesuaian atas Belanja Pengadaan Lisensi Anti Virus Biro Telematika yang lebih dari setahun periode Mei 2022 s.d. Mei 2023 sebesar Rp82.734.960,00.
 3. Jurnal Penyesuaian atas Belanja Pengadaan Zoom Biro Telematika yang lebih dari setahun periode 30 November 2022 s.d 1 Desember 2023 sebesar Rp2.197.800,00.

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp339.608.713,00 terdiri dari:

1. Jurnal Penyesuaian atas Belanja Dibayar Dimuka untuk Pengadaan Sistem Monitoring Jaringan Lemhannas RI berupa Renewal Fortigate periode Januari 2022 s.d. Agustus 2022 sebesar Rp149.829.906,00
2. Jurnal Penyesuaian atas Belanja Dibayar Dimuka untuk Pengadaan Aplikasi Lisensi Lemhannas RI periode Januari 2022 s.d. Agustus 2022 sebesar Rp104.876.626,00
3. Tambahan Jurnal Penyesuaian berdasarkan hasil reuiu APIP atas Belanja Dibayar Dimuka untuk Pengadaan Sistem Monitoring Jaringan Lemhannas RI berupa Renewal Fortigate periode Januari 2022 s.d. Juni 2022 (Ralat periode) sebesar Rp49.943.302,00
4. Jurnal Penyesuaian atas Belanja dibayar dimuka berupa Pengadaan Aplikasi Lisensi Lemhannas RI berupa Kaspersky Endpoint Security dan Zoom Meeting untuk bulan Juli 2022 s.d. Agustus 2022 sebesar Rp34.958.879,00

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp47.633.750,00*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp47.633.750,00 dan Rp112.504.750,00.

Berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Nomor SPS/01/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 antara Lemhannas RI dan Koperasi Primer Lemhannas RI (Koprimlem) perihal Sewa Ruang untuk Operasional Toko/Usaha Lainnya, Lemhannas berhak menerima Pendapatan atas pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan untuk kantin, toko, dan usaha lainnya sebesar Rp245.326.000,00 selama jangka waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023.

Atas perjanjian sewa tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022, Koprimlem baru membayar sewa sebesar Rp197.692.750,00 (NTPN 5895C2G4V7LR2A4O tanggal 15 Desember 2022), sehingga masih terdapat sisa yang belum dibayar sebesar Rp47.633.750,00 (Rp245.326.000,00 - Rp197.692.750,00). Bagian Keuangan Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyajikan nilai Rp47.633.750,00 tersebut sebagai saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Neraca Lemhannas per 31 Desember 2022.

Selanjutnya Koprimlem melunasi sisa kewajiban biaya sewa tersebut senilai Rp47.633.750,00 pada tanggal 23 Januari 2023 (NTPN 2A7870N9VQTHF3OS).

*Persediaan
Rp1.133.949.913,00*

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.133.949.913,00 dan Rp1.484.969.116,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Persediaan
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Persediaan	per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Naik/Turun (%)
Barang Konsumsi	665.171.374,00	1.081.945.346,00	(38,52)
Barang untuk Pemeliharaan	53.024.688,00	50.145.970,00	5,74
Suku Cadang	92.803.388,00	113.675.812,00	(18,36)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Bahan Baku	97.126.899,00	94.945.186,00	2,30
Persediaan Lainnya	225.823.564,00	144.256.802,00	56,54
Jumlah	1.133.949.913,00	1.484.969.116,00	(23,64)

Adapun mutasi persediaan dari saldo awal sampai dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Mutasi Persediaan s.d. 31 Desember 2022

Saldo per 1 Januari 2022	1.484.969.116,00
Mutasi tambah:	-
Saldo Awal (M01)	172.297.402,00
Pembelian (M02)	925.600.355,00
Hibah Masuk (M04)	-
Perolehan Lainnya (M06)	-
Reklas Masuk (M99)	56.763.475,00
Total Mutasi Tambah	1.154.661.232,00
Mutasi Kurang:	-
Beban Persediaan Konsumsi	982.988.621,00
Beban Persediaan Bahan Baku	12.845.868,00
Beban Persediaan Lainnya	366.760.590,00
Beban Persediaan Suku Cadang	114.683.683,00
Beban Persediaan Bahan u/Pemeliharaan	12.526.673,00
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan	15.875.000,00
Total Mutasi Kurang	1.505.680.435,00
Saldo per 31 Desember 2022	1.133.949.913,00

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp1.154.661.232,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Persediaan tahun 2022 sebesar Rp925.600.355,00 disajikan dalam tabel berikut ini:

Belanja Barang Persediaan Tahun 2022		
1	Pengadaan Obat-obat TW I Poliklinik Lemhannas	124.429.479
2	Belanja ATK Semester I Bag SDM	15.162.730
3	Pengadaan Obat-Obatan TW II Poliklinik Lemhannas	148.821.030
4	Pengadaan ATK Semester II Bag SDM	16.608.375
5	Pengadaan Obat-obatan TW III Poliklinik Lemhannas RI	39.206.040
6	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-Suplemen, Vitamin dan Obat-obatan (Kebutuhan Poli Gigi)	25.797.510
7	Pengadaan Obat-obatan TW IV Poliklinik Lemhannas RI	89.934.797
8	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-Suplemen, Vitamin dan Obat-obatan (Kebutuhan Poli Gigi)	34.200.210
9	Belanja Barang Persediaan IGD TW IV	37.610.734
10	Pengadaan kaporlap Tot di Riau	76.992.300
11	Belanja Barang Giat ToT di Riau	48.999.500
12	Penggandaan Modul Pemantapan Tot di Riau	15.999.500
13	Belanja Barang Giat Taplai di Bali	23.496.000
14	Penggandaan Modul Giat Taplai di Bali	15.994.000
15	Penggandaan Modul Peserta Giat Taplai di Bali	14.993.000
16	Pengadaan Kaporlap Giat Taplai di Bali	69.300.000
17	Pengadaan Kit Peserta Giat Taplai di Pontianak Kalbar	14.996.100
18	Penggandaan Modul Giat Taplai di Pontianak Kalbar	15.984.000
19	Pengadaan kaporlap Giat Taplai di Pontianak Kalbar	69.907.800
20	Belanja Barang Giat Taplai di Pontianak Kalbar	27.167.250
TOTAL		925.600.355

2. Koreksi BPK RI Tahun 2022 sebesar Rp172.297.402,00 merupakan koreksi saldo untuk persediaan yang belum tercatat ke dalam buku persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Saldo Awal	Keluar	Sisa	Harga Satuan	Total
117111	Barang Konsumsi					
1010310001	Masker Sensi Bedah (Covid)	4800	4270	530	2.499	1.324.470
1010310001	Masker Sensi Duckbill (Covid)	6000	2000	4000	3.311	13.244.000
1010310001	Tabung Gas	200	0	200	25.362	5.072.400
1010310001	Faceshield	299	22	277	9.000	2.493.000
1010310001	Masker Sensi (earloop)	15350	0	15350	2.361	36.241.350
1010311001	Plastik Limbah Medis	217	19	198	10.124	2.004.552
1010307003	APD Level 2 (Baju OK)	30	26	4	276.298	1.105.192
				Jumlah		61.484.964
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan					
1010305008	Hand Sanitizer (Antis) (Covid)	55	12	43	49.734	2.138.562
1010305008	Hand Sanitizer (Antis) (Covid)	182	0	182	52.008	9.465.456
				Jumlah		11.604.018
117131	Bahan Baku					
1010102002	WFA	247	0	247	57.443	14.188.421
				Jumlah		14.188.421
117199	Persediaan Lainnya					
1010401002	Multivitamin (Covid)	925	897	28	34.898	977.144
1010401002	SurbexZ	2535	0	2535	33.153	84.042.855
				Jumlah		85.019.999
				TOTAL		172.297.402

3. Jurnal penyesuaian atas temuan BPK RI merupakan kesalahan pembebanan akun beban barang operasional penanganan pandemi covid 19 (521131) yang seharusnya masuk ke dalam beban persediaan sebesar Rp56.763.475,00.

Sedangkan mutasi kurang persediaan sebesar Rp1.505.680.435,00 terdiri dari:

1. Beban barang persediaan selama tahun 2022 sebesar Rp1.489.805.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Nama Akun	Nilai Beban Versi SAKTI Persediaan						Total Beban Versi SAKTI Persediaan	Total Versi SAKTI GP	Selisih	Ketepatan
		RRI, Habis Pakai		PUI Hasil Operasi Fisik		Jurnal GP					
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit				
593111	Beban Persediaan Konsumsi	972.943.029,00	-	-	14.817.683,00	24.863.205,00	-	982.988.551,00	982.988.621,00	70,00	Selisih Pembuktian
593113	Beban Persediaan Bahan Up Pemeliharaan	11.929.870,00	-	-	-	596.803,00	-	12.526.673,00	12.526.673,00	-	-
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	114.683.683,00	-	-	-	-	-	114.683.683,00	114.683.683,00	-	-
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	12.845.868,00	-	-	-	-	-	12.845.868,00	12.845.868,00	-	-
593149	Beban Persediaan Lainnya	336.023.723,00	-	-	566.110,00	31.303.467,00	-	366.760.580,00	366.760.590,00	10,00	Selisih Pembuktian
	TOTAL	1.489.805.673,00	-	-	15.383.793,00	56.763.475,00	-	1.489.805.335,00	1.489.805.435,00	80,00	Selisih Pembuktian

2. Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan yang merupakan temuan dari BPK RI atas dua jenis barang hasil pengadaan tahun 2020 berupa 25 buah *Handwash Auto Sensor* senilai Rp12.375.000,00 dan satu buah *Desinfectant Fogging* senilai Rp3.500.000,00 dengan total kedua nilai tersebut sebesar Rp15.875.000,00 yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

C.6 Tanah

Tanah

Rp1.378.951.719.000
,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Lemhannas RI per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.378.951.719.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Tanah
per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
Saldo per 1 Januari	1.378.951.719.000,00	1.378.951.719.000,00
Mutasi Tambah:	-	-
Selisih Revaluasi Aset	0	0
Mutasi Kurang:	-	-
Selisih Revaluasi Aset	0	0
Saldo per 31 Des	1.378.951.719.000,00	1.378.951.719.000,00

Status tanah Lemhannas RI terdiri dari:

1. Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 seluas 11.860 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp806.824.650.786,90 atau 58,51% dari total nilai tanah belum bersertifikat sehingga perlu segera dilakukan langkah koordinasi efektif agar sertifikat tanah dapat diterbitkan; dan
2. Jalan Kebon Sirih No. 24, 26, 28 dan 30 Jakarta Pusat seluas 7.492 m² dengan jenis dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 59, 60, 61, dan 66.

Sampai dengan posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 (*Audited*), tanah di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 seluas 11.860 m² tersebut masih dalam proses sertifikasi.

C.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp374.186.141.790,0
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp374.186.141.790,00 dan Rp375.146.808.680,00.

Adapun mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021
Saldo per 1 Januari	375.146.808.680,00	373.677.175.403,00
Mutasi tambah:	-	-
Pengadaan	213.000.000,00	4.675.794.547,00
Koreksi Masuk	27.455.000,00	6.600.000,00
Hibah	-	-
Total Mutasi Tambah	240.455.000,00	4.682.394.547,00
Mutasi Kurang:	-	-
Penghapusan	1.201.121.890,00	3.194.185.045,00
Aset Ekstrakomtabel	-	18.576.225,00
Total Mutasi Kurang	1.201.121.890,00	3.212.761.270,00
Saldo per tanggal	374.186.141.790,00	375.146.808.680,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember	(354.979.252.641,00)	(339.363.524.042,00)
Saldo (netto) per tanggal	19.206.889.149,00	35.783.284.638,00

Mutasi tambah sebesar Rp240.466.000,00 terdiri dari:

1. Pengadaan sebesar Rp213.000.000,00 terdiri dari:
 - a. Perangkat layer interaktif Pusat Laboratorium Lemhannas RI sebesar Rp29.000.000,00 dengan NUP 3.05.01.05.058.51.

- b. Alat fitness Lemhannas RI TA. 2022 sebesar Rp184.000.000,00 dengan NUP 3.19.01.03.005.1-3.
2. Koreksi masuk sebesar Rp27.455.000,00 terdiri dari:
- Koreksi atas kesalahan penggunaan kode akun beban pemeliharaan peralatan dan mesin (523121) yang digunakan untuk pengadaan gitar sebesar Rp9.435.000,00 dan dipan sebesar Rp14.520.000,00 yang seharusnya dimasukkan sebagai aset peralatan dan mesin
 - Koreksi atas satu buah Desinfectant Fogging senilai Rp3.500.000,00 yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari pengadaan tahun 2020.

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp1.201.121.890,00 merupakan penghapusan aset intrakomptabel barang milik negara Lemhannas RI berupa Alsatri Alsintor Alohdad TA. 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 247 Tahun 2022 dengan rincian:

- Sebesar Rp1.201.121.890,00 merupakan aset intrakomptabel;
- Sebesar Rp14.997.000,00 merupakan aset ekstrakomptabel.

Terdapat satu kendaraan bukan milik Lemhannas RI yang digunakan untuk operasional, yaitu kendaraan milik Gubernur Lemhannas RI (nopol B 8665 ED) jenis Toyota Crown Royal Salon. Mobil tersebut tercatat sebagai aset mobil Sekretariat Negara dan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Lemhannas RI.

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp302.929.654.691,00. Berikut rincian mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022:

Tabel 5.27 Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Desember 2021
Saldo per 1 Januari	302.230.984.481,00	303.484.965.406,00
Mutasi tambah:	-	-
Hibah Pagar	402.897.000,00	607.404.997,00
Koreksi Nilai Aset	295.773.210,00	289.669.078,00
Total Mutasi Tambah	698.670.210,00	897.074.075,00
Mutasi kurang:		
Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap		2.151.055.000,00
Koreksi nilai Aset Non Reval		0,00
Penghapusan AMDAL	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00	2.151.055.000,00
Saldo per tanggal	302.929.654.691,00	302.230.984.481,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(64.216.095.742,00)	(57.847.601.003,00)
Saldo (netto) Per tanggal	238.713.558.949,00	244.383.383.478,00

Mutasi tambah sebesar Rp698.670.210,00 terdiri dari:

*Gedung dan
Bangunan
Rp302.929.654.691.,
00*

1. Hibah renovasi pagar di Jl. Medan Merdeka Selatan no. 10 dari peserta PPRA LXIII Lemhannas RI sebesar Rp402.897.000,00 dengan nomor register 2VMD4TRA dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) Nomor SPPH/01/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022.
2. Koreksi BPK RI atas kesalahan penggunaan kode MAK belanja pemeliharaan gedung atas pos jaga yang seharusnya menambah nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp295.773.210,00

Terdapat penertiban kode barang senilai Rp855.758.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 pada aplikasi SAKTI sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Nomor: SKET/131/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Koreksi Perubahan Kode Barang Bangunan Gedung Kantor NUP 6 menjadi Bangunan Rumah Genset Lemhannas RI dengan rincian sebagai berikut:

NO.	DATA AWAL			KOREKSI		KETERANGAN
	KODE BMN	URAIAN	NUP	KODE BMN	URAIAN	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	4010130005	Bangunan Rumah Genset	Kondisi fisik yaitu bangunan untuk mesin Genset

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.888.276.247,00.

Rp10.888.276.247,00

Mutasi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
Saldo awal	10.888.276.247,00	10.888.276.247,00
Mutasi Tambah:	-	-
Mutasi Kurang:		
Revaluasi Aset Tetap		
Saldo per tanggal	10.888.276.247,00	10.888.276.247,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.720.742.238,00)	(1.407.880.013,00)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(89.147.931,00)	(69.942.072,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2.919.285.715,00)	(2.328.194.536,00)
Saldo (netto) per tanggal	6.159.100.363,00	7.082.259.626,00

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Rp12.274.665.023,00

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.274.665.023,00 dan Rp11.917.337.823,00. Berikut adalah rincian Aset Tetap

Lainnya:

Tabel 5.29 Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Desember 2021
Saldo Awal	11.917.337.823,00	11.891.001.623,00
Mutasi tambah:	-	-
-Pengadaan Buku Perpustakaan	49.762.500,00	26.336.200,00
-Reklasifikasi dari Aset Lainnya	307.564.700,00	-
Total Mutasi Tambah:	357.327.200,00	26.336.200,00
Mutasi kurang:	-	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
Total Mutasi Kurang:	-	-
Saldo per tanggal	12.274.665.023,00	11.917.337.823,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(886.617.168,00)	(886.617.168,00)
Saldo (netto) Per tanggal	11.388.047.855,00	11.030.720.655,00

Rincian mutasi tambah sebesar Rp357.327.200,00 terdiri dari:

1. Pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp49.762.500,00 dengan NUP 6.01.01.01.999.2500-2551; dan
2. Penertiban Pencatatan Aset berupa Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap berupa Maket dan Foto Dokumen Lainnya sebesar Rp307.564.700,00 dengan NUP Nomor 6.02.02.02.999.2.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp424.818.752.015,
00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar (Rp424.818.752.015,00) dan (Rp415.750.168.313,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022:

Tabel 5.30 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan per 31 Des 2022	Nilai Buku per 31 Des 2022
1	Peralatan dan Mesin	374.186.141.790,00	354.985.793.641,00	19.200.348.149,00
2	Gedung dan Bangunan	302.929.654.691,00	64.217.165.322,00	238.712.489.369,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.888.276.247,00	4.729.175.884,00	6.159.100.363,00
4	Aset Tetap Lainnya	12.274.665.023,00	886.617.168,00	11.388.047.855,00
	Total	700.278.737.751,00	424.818.752.015,00	275.459.985.736,00

Tabel 5.31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2022	Akm. Penyusutan tahun 2021
1	Peralatan dan Mesin	354.985.793.641,00	339.363.524.042,00
2	Gedung dan Bangunan	64.217.165.322,00	57.847.601.003,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.729.175.884,00	3.806.016.621,00
4	Aset Tetap Lainnya	886.617.168,00	886.617.168,00
	Total	424.818.752.015,00	401.903.758.834,00

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

C.12 Aset Tidak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp140.235.396.360,0
0*

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp140.235.396.360,00 dan Rp213.898.975.503,00. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.32 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Desember 2021
Software	137.309.808.751,00	211.001.187.894,00
Lisensi	2.873.768.009,00	2.873.768.009,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	51.819.600,00	24.019.600,00
Jumlah	140.235.396.360,00	213.898.975.503,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena terdapat Reklasifikasi Keluar sejumlah Aset Tak Berwujud sepanjang tahun 2022.

Tabel 5.33 Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021
Saldo Awal	213.898.975.503,00	217.820.097.393,00
Mutasi tambah:	-	-
Pengadaan	1.014.597.621,00	1.900.556.912,00
Reklas Masuk	-	-
Total Mutasi Tambah	1.014.597.621,00	1.900.556.912,00
Mutasi Kurang:	0	0
Reklas Keluar	74.678.176.764,00	5.821.678.802,00
Penghapusan	-	-
Total Mutasi Kurang	74.678.176.764,00	5.821.678.802,00
Saldo Akhir	140.235.396.360,00	213.898.975.503,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(137.247.214.336,00)	(207.082.880.562,00)
Saldo Netto Akhir	2.988.182.024,00	6.816.094.941,00

1. Mutasi tambah sebesar Rp1.014.597.621,00 terdiri dari:

- a. Pengadaan *Secure Socket Layer (SSL) Certificate* untuk domain *lemhannas.go.id* sebesar Rp27.800.000,00;
 - b. Pengadaan Update Aplikasi Siskurtanas (Pengukuran IKN dan Integrasi Data) Tahap VII di 2 Provinsi sebesar Rp829.845.841,00, dengan NUP 8.01.01.01.001.1.
 - c. Koreksi atas belanja Microsoft Office yang tercatat sebagai beban pemeliharaan lainnya sebesar Rp156.951.780,00
2. Mutasi kurang sebesar Rp74.678.178.764,00 merupakan reklasifikasi keluar ke Aset Lain-Lain atas barang milik negara Lemhannas RI berupa Aset Tak Berwujud *Software* Komputer sesuai dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 179 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 203 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022

C.13 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain
Rp79.789.979.826,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp79.789.979.826,00 dan Rp5.551.917.762,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Lemhannas RI serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset lain-lain per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam table berikut:

Tabel 5.34 Rincian Aset Lain-lain tahun per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	80.922.000,00	388.486.700,00
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	79.709.057.826,00	5.163.431.062,00
Jumlah	79.789.979.826,00	5.551.917.762,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Desember 2021
Saldo Awal	5.551.917.762,00	5.959.713.781,00
Mutasi tambah	-	-
Reklasifikasi Masuk	74.678.176.764,00	
Total Mutasi Tambah	74.678.176.764,00	
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Keluar	440.114.700,00	407.796.019,00
Total Mutasi Kurang	440.114.700,00	407.796.019,00
Saldo Akhir	79.789.979.826,00	5.551.917.762,00
- Akumulasi Penyusutan aset tetap yg tdk digunakan dlm operasi	(80.922.000,00)	(80.922.000,00)
- Akumulasi Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam operasi	(79.709.057.826,00)	(5.163.431.062,00)
Saldo (netto) Akhir	-	307.564.700,00

Mutasi tambah sebesar Rp74.678.176.764,00 merupakan reklasifikasi masuk atas

software komputer dengan kode 8.01.01.01.001 yang sudah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 179 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 203 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022.

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp440.114.700,00 terdiri dari:

- a) Sebesar Rp307.564.700,00 merupakan reklasifikasi keluar dari Aset lain-lain ke Aset Tetap berupa Maket dan Foto Dokumen Lainnya dengan kode 6.02.02.02.999.2.
- b) Sebesar Rp132.550.000,00 merupakan penghapusan berupa Antivirus Kaspersky (sudah kadaluwarsa) dengan NUP 8.01.01.01.001.2749-2750.

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
lainnya
(Rp217.056.813.144,
00)*

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp217.056.813.144,00) dan (Rp214.645.627.744,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku Aset Lainnya Per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
	Aset Tak Berwujud			
1	Software	136.236.275.927,00	136.216.656.945,00	19.618.982,00
2	Lisensi	1.030.557.391,00	1.030.557.391,00	-
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
5	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	80.922.000,00	80.922.000,00	-
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	79.709.057.826,00	79.709.057.826,00	-
JUMLAH		217.056.813.144,00	217.037.194.162,00	19.618.982,00

Tabel 5.37 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Tetap	per 31 Des 2022	Per 31 Desember 2021
1	Software Komputer	136.236.275.927,00	208.658.094.087,00
2	Lisensi	1.030.557.391,00	743.180.595,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-
4	ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	80.922.000,00	5.163.431.062,00
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	79.709.057.826,00	80.922.000,00
Akumulasi Amortisasi		217.056.813.144,00	214.645.627.744,00

C.15 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
pihak ketiga
Rp544.622.320,00*

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp544.622.320,00,00 dan Rp Nihil. Saldo sebesar Rp544.622.320,00 terdiri dari:

- a. Pemakaian Telepon Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp6.249.213,00 sesuai dengan kwitansi nomor: KW/05/I/2023/TEL tanggal 16-1-2023; dan
- b. Pemakaian Listrik Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp538.373.107,00

sesuai dengan kuitansi nomor: KW/2.152.1/04012023 tanggal 4-1-2023.

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp634.712.471,00 dan Rp1.250.120.554,00. Saldo sebesar Rp634.712.471,00 terdiri dari:

- a. Sewa Gedung BRI periode Januari 2023 – Desember 2023 sebesar Rp331.154.333,33
- b. Sewa Gedung BRI periode Januari 2024 – November 2024 sebesar Rp303.558.138,89

No	Uraian	Pendapatan		
		Pendapatan yang telah diterima	Pendapatan yang dapat diakui	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Sewa Gedung BRI	993.463.000,00		
	Desember 2021		27.596.194,44	
	Januari 2022 sd Desember 2022		331.154.333,33	-
	Januari 2023 sd Desember 2023			331.154.333,33
	Januari 2024 sd November 2024			303.558.138,89
	TOTAL		358.750.527,78	634.712.472,22

Adapun sewa Gedung Dwi Warna memperoleh relaksasi perpanjangan masa sewa selama satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 1 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-138/MK.6/KNL.0704/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Ketahanan Nasional RI.

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.657.583.282.743,00 dan Rp1.682.723.594.943,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp634.712.471,00*

*Ekuitas
Rp1.657.583.282.743
,00*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASI

Pendapatan

PNBP

Rp963.799.035,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp963.799.035,00 dan Rp910.428.192. Pendapatan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.38 Uraian PNBP per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	per 31 Des 2022	per 31 des 2021	%NAIK (TRN)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	957.180.583	909.123.888	5,29
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.618.452	1.304.304	407,43
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		-	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		-	
Jumlah	963.799.035	910.428.192	5,86

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp963.799.035,00 terdiri dari:

1. Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan kontrak perjanjian sewa antara Koperasi Primer Lemhannas RI dengan Lemhannas RI merupakan pendapatan sewa gedung kantin dan toko/usaha lainnya periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023 dari Koperasi Primer Lemhannas RI berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Nomor SPS/01/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp245.326.500,00;
2. Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari sewa gedung Dwi Warna periode Januari 2022 sd September 2022 sebesar Rp284.253.750,00;
3. Pembayaran sewa ruang kelas pancasila giat taplai bagi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bulan Agustus 2022 sebesar Rp32.405.000,00 dengan nomor NTPN FEED78N3E1ASF7GT tanggal 24 Agustus 2022;
4. Pembayaran Sewa Ruang Kelas Pancasila giat Taplai bagi Jaringan Pengusaha Nasional Tahun 2022 sebesar Rp32.405.000,00 dengan nomor NTPN 048F661QUHMKSDIK tanggal 21 September 2022
5. Pembayaran Sewa Koperasi bulan Juli s.d. Desember 2022 sebesar Rp197.692.750,00 dengan nomor NTPN 5895C2G4V7LR2A4O tanggal 17 November 2022.
6. Pembayaran sewa gedung giat taplai bagi Ikatan Alumni ITB tanggal 24 sd 30 Oktober 2022 sebesar Rp31.636.000,00 dengan nomor NTPN F0EEB6U8ECESKFBH tanggal 17 November 2022.
7. Pengakuan pendapatan Sewa Gedung BRI periode Januari sd Desember 2022 sebesar Rp331.154.333,00.
8. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp6.618.452,00 terdiri dari:
 - 1) Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Kaporlap Peserta

- Kegiatan ToT Taplai di Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar Rp154.000,00 dengan nomor NTPN C2AFF7QLU697BCO4 tanggal 11 Maret 2023.
- 2) Pembayaran denda keterlambatan atas pemeliharaan AC di lingkungan Lemhannas RI Tahun 2022 oleh CV Semanggi Jaya sebesar Rp30.400,00 dengan nomor NTPN 750101JNFCEGSLUV tanggal 12 Mei 2022.
 - 3) Pembayaran denda keterlambatan belanja barang dukungan dan pelayanan kesiapan konsumsi peserta PPRA LXIV Lemhannas RI tahun 2022 sebesar Rp4.400,00 dengan nomor NTPN 57C5D1JNFCTKHVA5 tanggal 19 Oktober 2022.
 - 4) Pembayaran denda keterlambatan belanja barang fullday kegiatan dialog wawasan kebangsaan di Provinsi Bengkulu tahun 2022 sebesar Rp82.500,00 dengan nomor NTPN 16D841JNFD0EV4NP tanggal 14 November 2022.
 - 5) Pembayaran denda keterlambatan perbaikan ruang gubernur Lemhannas RI sebesar Rp12.250,00 dengan nomor NTPN A665C7QLU71914QC tanggal 17 November 2022.
 - 6) Pembayaran denda keterlambatan pengerjaan pengecatan tembok gedung panca gatra dan pagar halaman kebon sirih Lemhannas RI sebesar Rp23.591,00 dengan nomor NTPN 4D0B86U8ECESK4QV tanggal 17 November 2022.
 - 7) Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan survey data siskurtannas Lemhannas RI sebesar Rp192.000,00 dengan nomor NTPN B742A7QLU71FEOK4 tanggal 24 November 2022.
 - 8) Pembayaran kekurangan denda keterlambatan pekerjaan Survey data Siskurtanas TA. 2022 sebesar Rp1.397.520,00 dengan nomor NTPN 5C5F961QUHSM6MO tanggal 24 November 2022.
 - 9) Pembayaran denda keterlambatan perbaikan ruang Karoren Lemhannas RI Tahun 2022 sebesar Rp2.250,00 dengan nomor NTPN 648BC61QUHSQQKIK tanggal 28 November 2022.
 - 10) Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pemeliharaan AC di Gedung perkantoran Lemhannas RI TA. 2022 sebesar Rp10.988,00 dengan nomor NTPN 2218048VUSO3973M tanggal 1 Desember 2022.
 - 11) Pembayaran kekurangan denda penyelesaian keterlambatan pekerjaan dan laporan harian Pemeliharaan AC sebesar Rp1.924.106,00 dengan nomor NTPN 97B7E48VUSQ83V1E tanggal 2 Desember 2022.
 - 12) Pembayaran denda keterlambatan belanja barang biaya renovasi pos jaga gedung Lemhannas RI TA. 2022 sebesar Rp59.130,00 dengan nomor NTPN A88FE8N3E1M97V4 tanggal 5 Desember 2022.
 - 13) Pembayaran denda keterlambatan denda pekerjaan Survey Data Siskurtannas II Lemhannas RI sebesar Rp48.000,00 dengan nomor NTPN

A57541JNFD389LF9 tanggal 8 Desember 2022.

14) Pembayaran denda keterlambatan atas pemeliharaan AC di gedung perkantoran Lemhannas RI sebesar Rp133.021,00 dengan nomor NTPN E0F0461QUHV6C4TI tanggal 8 Desember 2022

15) Pembayaran denda keterlambatan atas belanja barang biaya pemeliharaan AC di gedung perkantoran Lemhannas RI tahun 2022 berdasarkan SPK/271/XI/2022 tanggal 15 November 2022 sebesar Rp931.145,00 dengan nomor NTPN B395461QUHV7DC1I tanggal 9 Desember 2022

16) Pembayaran denda keterlambatan belanja barang operasional penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp261.151,00 dengan nomor NTPN 08B8B2G4V7LVA70Q tanggal 19 Desember 2022.

Beban Pegawai

Rp79.679.020.836,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp79.679.020.836,00 dan Rp71.066.611.262,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berikut disajikan data Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021:

Tabel 5.39 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	per 31 Des 2022	per 30 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	16.635.043.310,00	17.112.803.580,00	(2,79)
Beban Pembulatan Gaji PNS	280.855,00	287.931,00	(2,46)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.081.243.669,00	1.143.339.026,00	(5,43)
Beban Tunj. Anak PNS	248.995.407,00	258.004.550,00	(3,49)
Beban Tunj. Struktural PNS	4.814.908.760,00	5.206.840.000,00	(7,53)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.657.070.000,00	1.222.677.000,00	35,53
Beban Tunj. PPh PNS	4.092.643.091	3.320.716.883,00	23,25
Beban Tunj. Beras PNS	854.519.790,00	877.295.880,00	(2,60)
Beban Uang Makan PNS	3.074.672.850,00	3.214.935.300,00	(4,36)
Beban Tunj. Umum PNS	525.710.000,00	568.255.000,00	(7,49)
Beban Uang Honor Tetap	3.900.000.000,00	3.885.000.000,00	0,39
Beban Uang Lembur	399.884.000,00	399.944.450,00	(0,02)
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	42.394.049.104,00	33.856.511.662,00	25,22
Jumlah	79.679.020.836,00	71.066.611.262,00	12,12

Kenaikan sebesar 12,12% pada Beban Pegawai terjadi antara lain karena:

- Kenaikan beban tunjangan fungsional PNS sebesar 35,53%. Hal ini disebabkan adanya pembayaran tunjangan fungsional susulan kepada pegawai Lemhannas RI yang telah dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 166 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 34 tahun 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan ke Dalam Jabatan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

- b) Kenaikan beban pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) sebesar 25,22% disebabkan adanya kenaikan *grade* pegawai Lemhannas RI sesuai dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.

Sedangkan penurunan sebesar 2,79% pada beban gaji pokok PNS diikuti dengan penurunan sejumlah beban gaji yang melekat dengan gaji pokok PNS disebabkan adanya pegawai Lemhannas RI yang memasuki masa purna bakti di tahun 2022.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp1.362.595.079,
00*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.362.595.079,00 dan Rp714.181.793,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan TA. 2022 mengalami kenaikan di banding TA 2021 dikarenakan pagu belanja persediaan TA 2022 lebih besar dibanding TA. 2021. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	per 30 Des 2022	per 30 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	982.988.621,00	449.458.914,00	118,70
Beban Bahan Baku	12.845.868,00	12.199.000,00	5,30
Beban Persediaan Lainnya	366.760.590,00	252.523.879,00	45,24
Jumlah Beban Persediaan	1.362.595.079,00	714.181.793,00	90,79

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp66.446.895.109,
00*

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp66.446.895.109,00 dan Rp54.528.870.146,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2022	Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	6.623.973.312,00	3.736.773.590,00	77,26
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	72.866.000,00	84.770.000,00	(14,04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	697.818.000,00	703.480.000,00	(0,80)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.874.669.019,00	647.324.850,00	189,60
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	1.024.877.418,00	562.790.244,00	82,11
Beban Bahan	23.019.987.441,00	17.634.922.110,00	30,54
Beban Honor Output Kegiatan	680.190.000,00	201.360.000,00	237,80
Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.248.380.375,00	9.561.331.781,00	(13,73)
Beban Langganan Listrik	6.778.343.107,00	5.528.761.508,00	22,60
Beban Langganan Telepon	83.583.305,00	87.602.366,00	(4,59)
Beban Langganan Air	1.168.878.230,00	1.212.001.290,00	(3,56)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.203.164.020,00	2.912.924.184,00	9,96
Beban Jasa Konsultan	29.277.360,00	694.995.180,00	(95,79)
Beban Sewa	3.907.200.000,00	3.832.080.000,00	1,96
Beban Jasa Profesi	8.742.484.522,00	6.977.146.818,00	25,30
Beban Jasa Lainnya	281.303.000,00	116.850.000,00	140,74
Beban Aset Ekstrakomtabel	9.900.000,00	33.756.225,00	(70,67)
Jumlah	66.446.895.109,00	54.528.870.146,00	21,86

Adapun rincian beban barang dan jasa untuk penanganan pandemi covid-19 setelah dikoreksi oleh BPK RI tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.284.374.000,00	1.024.877.418,00	79,80
	Jumlah Kotor	1.284.374.000,00	1.024.877.418,00	79,80

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp11.482.249.891,00

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.482.249.891,00 dan Rp14.669.629.381,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar 21,73% disebabkan karena anggaran pemeliharaan yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 dan koreksi keluar atas Belanja pemeliharaan dari Tim BPK RI untuk Lemhannas RI TA. 2022. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.662.361.549,00	6.260.738.935,00	(41,50)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.066.247.083,00	6.617.448.340,00	(8,33)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.521.360,00	0,00	∞
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.599.929.104,00	1.591.959.994,00	0,50
Beban Persediaan Bahan u/Pemeliharaan	12.526.673,00	25.282.430,00	(50,45)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	18.980.439,00	0,00	100,00
Beban Persediaan Suku Cadang	114.683.683,00	174.199.682,00	(34,17)
Jumlah	11.482.249.891,00	14.669.629.381,00	(21,73)

Pada tahun 2022, terdapat Beban Asuransi Gedung dan Bangunan untuk gedung Astagatra sebesar Rp18.980.439,00 untuk periode 30 September 2022 sd 31 Desember 2022. Penerapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengansuransian Barang Milik Negara.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp17.377.230.138,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.377.230.138,00 dan Rp6.297.127.436,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	per 31 des 22	per 31 des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	11.895.714.735,00	5.749.911.436,00	106,89
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	194.628.000,00	113.250.000,00	71,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	170.545.000,00	173.984.000,00	(1,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.601.186.682,00	259.982.000,00	1.669,81
Beban perjalanan Biasa - Luar Negeri	392.572.637,00	0,00	100,00
Beban perjalanan Lainnya- Luar Negeri	122.583.084,00	0,00	100,00
Jumlah	17.377.230.138,00	6.297.127.436,00	175,95

Kenaikan beban perjalanan biasa, beban perjalaban dinas dalam kota, beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota dan perjalanan biasa luar negeri disebabkan pada tahun 2022 banyak kegiatan yang diselenggarakan secara offline (tatap muka langsung). Unit kerja sudah mulai melakukan perjalanan dinas yang bersifat luring ke daerah maupun luar negeri karena sudah ada pelonggaran ketentuan perjalanan dinas dalam masa pandemi Covid-19.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
ke Masyarakat
RpNihil*

Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar RpNihil dan Rp54.595.000,00. Beban Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat merupakan penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya. Adapun saldo sebesar Rp53.790.000,00 berupa penyerahan sejumlah pin dan sertifikat kepada peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai).

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp393.829.450,00 dari pagu/anggaran sebesar Rp396.100.000,00. Sedangkan dalam Laporan Operasional, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah RpNihil. Perbedaan ini disebabkan adanya temuan BPK RI TA. 2021 bahwa penggunaan akun tersebut kurang tepat sehingga tidak dilakukan pembebanan atas belanja tersebut.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp26.543.916.311
,00*

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.543.916.311,00 dan Rp35.707.615.022,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 17,58% dibanding TA 2021 dikarenakan adanya penurunan alokasi pagu anggaran untuk belanja modal yang membentuk aset (kecuali penambahan aset akibat *refocussing*) serta terdapat sejumlah pelelangan atau penghapusan aset yang sudah tidak terpakai.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.45 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.822.341.489,00	23.842.405.111,00	(29,44)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.254.680.159,00	6.248.848.270,00	0,09
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	923.159.263,00	923.159.213,00	0,00
Jumlah Penyusutan	24.000.180.911,00	31.014.412.594,00	(22,62)
Beban Amortisasi Software	2.256.358.604,00	3.785.301.075,00	(40,39)
Beban Amortisasi Lisensi	287.376.796,00	453.949.529,00	(36,69)
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	453.951.824,00	(100,00)
Jumlah Amortisasi	2.543.735.400,00	4.693.202.428,00	(45,80)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.543.916.311,00	35.707.615.022,00	(25,66)

D.9. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus/ Defisit
Dari Kegiatan
Non Operasional
Rp1.110.598.594,
00*

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.110.598.594,00 dan Rp1.153.036.695,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

- a. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp7.144.584,00.
- b. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp181.926.000,00.
- c. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp45.500.000,00
- d. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp855.758.000,00 merupakan penerbitan kode barang berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 pada aplikasi SAKTI sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Nomor: SKET/131/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Koreksi Perubahan Kode Barang Bangunan Gedung Kantor NUP 6;
- e. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp20.270.010,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.682.723.594.943,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.682.723.594.943,00 dan Rp1.744.780.158.550,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp200.817.509.735,00)

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp200.817.509.735,00) dan (Rp180.975.165.077,00). (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus (defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar
RpNihil

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Jumlah dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah RpNihil.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
(Rp974.167.160,00)

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp974.167.160,00) dan (Rp34.158.016.671,00).

Penyesuaian Nilai Aset
Nihil

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Nihil. Penyesuaian Nilai Aset adalah penyesuaian harga awal dan akhir dari aset.

Koreksi Nilai Persediaan
RpNihil

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Nihil.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp3.525.000,00)

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.525.000,00) dan (Rp37.768.406.686,00). Koreksi atas reklasifikasi tahun 2022 sebesar (Rp3.525.000,00) merupakan jumlah akumulatif sejumlah transaksi atas koreksi BPK RI tahun 2022, antara lain:

1. Koreksi debit atas 25 buah *handwash auto sensor* senilai Rp12.375.000,00 yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2. Koreksi debit atas beban penyusutan peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan sebesar Rp1.050.000,00.
3. Koreksi kredit atas pengakuan beban aset ekstrakomptabel atas 25 buah *handwash auto sensor* sebesar Rp9.900.000,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap (RpNihil)

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi aset tetap Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar RpNihil.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Rp970.642.160,00)

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi atas nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp970.642.160,00) dan Rp3.385.157.835. Koreksi sebesar (Rp970.642.160,00) terdiri dari:

1. Koreksi penertiban kode barang senilai (Rp772.942.709,00) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 6 pada aplikasi SAKTI sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SKET/131/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Koreksi Perubahan Kode Barang Bangunan Gedung Kantor NUP 6;
2. Koreksi nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar (Rp196.824.340,00)
3. Koreksi atas kesalahan penggunaan kode MAK belanja pemeliharaan gedung yang seharusnya menambah nilai aset sebesar Rp875.111,00

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi lain-lain Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar RpNihil dan Rp225.232.180,00.

Koreksi Lain-Lain RpNihil

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp176.651.364.695,00 dan Rp153.076.618.141,00. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun ditagihkan ke entitas lain dengan akun diterima dari entitas lain ditambah dengan pengesahan hibah langsung. Saldo sebesar Rp121.971.675.936,00 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas Rp.176.651.364.695,00

1. Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp176.916.570.241,00
2. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp668.102.546,00)
3. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp402.897.000,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.657.583.282.743,00 dan Rp1.682.723.594.943,00.

Ekuitas Akhir Rp1.657.583.282.743,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN.

F.1.1. Penyelesaian Administrasi Hibah Tahun per 31 Desember 2022.

Pada tahun 2021, Lemhannas RI telah mendapatkan sejumlah hibah. Antara lain:

a. Hibah Patung dalam rangka hari lahirnya Pancasila

Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, Lemhannas RI melalui Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima dan meresmikan pemberian patung Ir. Soekarno dari Presiden ke-5 RI DR. (H.C). Megawati Soekarnoputri. Monumen Bung Karno di Lemhannas RI mengacu pada patung Bung Karno di Museum Blitar. Ukuran patung Bung Karno mencapai 4 meter, berbahan logam campuran terdiri dari tembaga, kuningan, timah, dan seng sari, warna patung perunggu kimia bakar, dan memiliki berat kurang lebih dua ton. Dudukan patung Bung Karno menurut Megawati memiliki makna mendalam. Pertama; segi empat dan segi lima bermakna tahun kemerdekaan, kedua; segi delapan bermakna bulan kemerdekaan, ketiga; segi dudukan patung berjumlah tujuh belas yang bermakna tanggal kemerdekaan.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan Pendirian monumen Dr. (H.C.) Ir. Soekarno di halaman depan gedung Lemhannas RI dimaksudkan untuk menghormati Bung Karno sebagai perintis dan pendiri Lemhannas RI yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 1965. Adapun Monumen Bung Karno yang sedang membaca buku melambangkan kebiasaan Bung Karno membaca buku. "Ini memberikan dasar pengetahuan dan keluasan wawasan bagi pembuatan keputusan dan kebijakan dalam berbagai rumusan gagasan beliau. Sampai dengan periode 31 Desember 2022, penyelesaian administrasi hibah patung tersebut masih dalam proses permintaan kelengkapan dokumen kepada pemberi hibah.

F.1.2 Kesalahan Penentuan dan Penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK).

Pada tahun 2022, terdapat sejumlah penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini merupakan hasil revidi APIP Lemhannas RI. Data kesalahan penggunaan MAK tersebut antara lain

Daftar Ketidaksesuaian Kode MAK				
No	Kode MAK	Uraian	Nominal	Keterangan
1	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.906.210	Perbaikan Pos Jaga Roum
2	536111	Belanja Modal Lainnya	27.800.000	Pengadaan SSL Labkur
3	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	393.823.450	Persediaan Taplai
4	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	156.529.980	Pengadaan Micosoft Telematika

F.1.2.1. Belanja Persediaan di Kedeputian Kebangsaan berdasarkan hasil reuiu APIP Lemhannas RI untuk pengadaan sertifikat, Pin kepada para peserta semula menggunakan MAK 526311 (Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda) kurang tepat karena barang tersebut adalah barang habis pakai. Sebaiknya menggunakan MAK belanja habis pakai. Adapun rincian persediaannya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Tgl_Dokumen	Akun	Nilai	Nomor SPP
1	Pembayaran Belanja Barang Giat Taplaikbs di Prov. Kalimantan Barat	30-06-2022	526311	50	'02463T
2	Pembayaran Belanja Barang Giat Taplaikbs di Prov. Kalimantan Barat	30-06-2022	526311	27.167.200	'02463T
3	Pengadaan Kit Peserta Giat Taplaikbs di Pontianak Provinsi Kalbar	30-05-2022	526311	14.996.100	'01621T
4	Penggandaan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	30-05-2022	526311	15.984.000	'01618T
5	Pengadaan Kaporlap kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Prov Bali	18-03-2022	526311	69.300.000	'00794T
6	Pengadaan Kaporlap Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	23-05-2022	526311	69.907.800	'01442T
7	Pengadaan kaporlap peserta kegiatan pelatihan untuk pelatih/Training Of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru dan Widyaiswara di Prov. Riau (Pekanbaru)	18-02-2022	526311	76.992.300	'00618T
8	PENGADAAN KIT TAPLAI DI DENPASAR BALI	16-03-2022	526311	14.993.000	'00544T
9	PENGGANDAAN MODUL TAPLAI DI DENPASAR BALI	16-03-2022	526311	15.994.000	'00545T
10	BELANJA BARANG TAPLAI DENPASAR BALI	16-03-2022	526311	23.496.000	'00547T
11	Belanja Barang Kegiatan ToT Taplai	18-02-2022	526311	48.999.500	'00391T
12	ATK	'02-03-2022	526311	15.999.500	'00393T
	TOTAL			393.829.450	

F.1.3. Kerja Sama Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan oleh Lemhannas RI dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Internal (LHP SPI) - Lemhannas RI Tahun 2019 pada poin 1.4 Pola Kerjasama Pelaksanaan Diklat Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dengan Pihak Ketiga/Kementerian/Lembaga Lain belum jelas dan belum diungkapkan dalam Laporan Keuangan Lemhannas RI atas temuan tersebut. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lemhannas RI agar mengkaji pola pengelolaan keuangan atas kerja sama kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dengan pihak ketiga/instansi pemerintah lainnya.

Lemhannas RI telah menindaklanjuti dengan bersurat ke Kementerian Keuangan Nomor:B/3476/08/29/19/SET tanggal 07 Desember 2020 tentang Permohonan Klarifikasi Pembiayaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan dijawab oleh Kementerian Keuangan RI via layanan Hai Anggaran dengan nomor tiket:20201204-NVXUBW yang isinya menyatakan bahwa pembayaran tidak ada yang ditujukan ke Lemhannas RI sebagai institusi dan kegiatan dikoordinir oleh pihak kedua, serta Lemhannas belum mempunyai PP Jenis dan Tarif PNBPN sehingga tidak ada yang dilaporkan sebagai hibah, PNBPN, maupun BLU oleh

Lemhannas RI. Namun demikian, pihak Kemenkeu RI mengusulkan usulan jenis dan tarif PNPB di lingkungan Lemhannas RI melihat adanya potensi penyelenggaraan diklat atau pelatihan.

Dalam tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan Taplai dengan pihak ketiga, yaitu:

*Daftar Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Tahun 2022
(Non-APBN)*

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Alumni ToBe Institute (Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu)	17 - 23 Januari 2022	Lemhannas RI	84 Orang
2	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)	25 - 31 Juni 2022	Lemhannas RI	95 Orang
3	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Komponen Bangsa Provinsi Papua	9 - 16 Agustus 2022	Jayapura, Papua	101 Orang
4	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2022	22 - 26 Agustus 2022	Lemhannas RI	68 Orang
5	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS)	29 Agustus - 4 September 2022	Lemhannas RI	68 Orang
6	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Alumni ITB Angkatan II dan Yayasan Perguruan Cikini	24 - 30 Oktober 2022	Lemhannas RI	110 Orang
TOTAL				526 Orang

Perjanjian Kerja Sama antara Lemhannas RI dengan Pihak Ketiga merupakan kegiatan pemberian Materi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi pihak ketiga sesuai dengan konstitusi NKRI dan Peraturan Perundang-Undangan dalam mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memantapkan wawasan dan kemampuan memahami serta memecahkan masalah-masalah secara komprehensif dan integrative berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan serta terbangunnya kemampuan manajerial dalam mengamalkan fungsi secara menyeluruh bagi pihak ketiga. Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan diisi dengan ceramah, diskusi, simulasi yang dilaksanakan sepenuhnya di Lemhannas RI dengan materi dan pencereamah/Panelis.

Bentuk Kerja Sama yang disepakati oleh Lemhannas dan Pihak Ketiga, meliputi:

1. Kegiatan Buka Tutup
 - a. Pembukaan dilaksanakan di Lemhannas RI
 - b. Penutupan dilaksanakan di Lokasi Outbond.
2. Materi dan Narasumber sepenuhnya di fasilitasi dan menjadi tanggungjawab Lemhannas RI dan dilaksanakan selama 5(lima) hari di ruang kelas Komplek Gedung Lemhannas RI dengan durasi (Ceramah 3 hari dan Diskusi Fanel 2 hari) kemudian dilanjutkan kegiatan outward Bound di luar Gedung Lemhannas RI.
3. Peserta diikuti oleh pihak ketiga yang telah disepakati bersama.
4. Pihak Ketiga menginformasikan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan kepada masing-masing pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut pad angkatan yang sudah disepakati.

5. Setiap angkatan maksimal 100 (seratus) orang dan disesuaikan dengan daya tampung ruangan, dan apabila pendaftaran peserta melebihi jumlah tersebut, maka para pihak sepakat untuk mengalihkan kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya dan atau dipertimbangkan untuk membuka kelas angkatan tambahan bila diperlukan.
6. Para pihak akan saling berkoordinasi dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
7. Jika terjadi suatu permasalahan dan perbedaan pendapat, serta kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak tercapainya jumlah peserta dalam batas minimal/sebab lain maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi oleh itikad baik.

Pembiayaan kegiatan sepenuhnya berasal dari biaya kepesertaan yang dibebankan kepada peserta dan dikoordinir, administrasi serta pertanggungjawaban oleh pihak ketiga.

**VI. PENUTUP LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(disajikan dalam bentuk rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2022 (*Audited*) yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (***good governance and clean government***).

Jakarta, Mei 2023

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,

